

KLIPING
BERITA
KEGIATAN
UMA
FEBRUARI
2015

WASPADA

WASPADA

Minggu

11 Februari 2015

B4

Bahaya Rokok Pada Penderita Diabetes

Di Indonesia kebiasaan merokok telah ada sejak abad 19. Rokok Indonesia memiliki ciri khas dengan campuran raja-janjan cengkeh yang dikenal dengan kretek, sedangkan rokok dari luar Indonesia disebut rokok putih. Legenda rokok kretek tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kota Kudus, karena ditemukan oleh H. Djamar yang kala itu sedang merasa sakit pada dadanya. Untuk meredakan sakitnya, Djamar mengoleskan minyak cengkeh ke dadanya. Benar saja, rasa sakitnya mereda. Iseng-iseng Djamar mencampur ranjan cengkeh dengan tembakau untuk dilinting dan dijadikan rokok. Konon setelah merokok rokok ciptaannya, sakit pada Djamar mereda. Kabar itu pun menyebar dan orang mulai banyak memesan kretek.

Namun terlepas dari cerita asal-usul rokok kretek, beberapa penelitian menunjukkan rokok memiliki kandungan ribuan zat berbahaya yang mengancam kesehatan orang yang ada di sekitar perokok (perokok aktif), yakni perokok pasif. Kemudian, memiliki resiko terpapar bahaya rokok.

Bahaya Rokok Bagi Diabetisi

Merokok dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit, di antaranya kanker paru

dan mulut, jantung, stroke serta tekanan darah tinggi. Merokok juga bisa meningkatkan resiko seseorang terserang diabetes melitus (DM).

Kebiasaan merokok dengan diabetes memiliki keterkaitan sangat erat dan juga dapat memperparah penyakit diabetes. Banyak penelitian menemukan indikasi merokok dapat menyebabkan intoleransi pada glukosa yang ditandai dengan kondisi tubuh tidak bisa menerima glukosa. Seorang yang merokok lebih dari 29 batang sehari memiliki resiko terserang diabetes sebesar 61 persen, sedangkan, yang mengisap rokok kurang dari 20 batang sehari memiliki kenaikan resiko diabetes 29 persen. Beberapa perokok yang menderita diabetes banyak mencari jalan alternatif agar bisa tetap merokok tanpa

memasukkan nikotin ke dalam darah.

Pilihannya tertuju pada rokok elektronik. Namun, rokok elektronik ternyata memiliki kandungan nikotin. Perokok yang menderita diabetes tidak punya pilihan lain kecuali segera menghentikan kebiasaannya, sebab dapat memicu terjadinya komplikasi yang berbahaya. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung merupakan komplikasi diabetes yang mematikan.

Banyak orang mengeluh tentang sulitnya berhenti merokok. Seorang perokok merasa tidak nyaman apabila tidak merokok untuk waktu yang relatif lama. Biasanya dia akan gelisah, kehilangan konsentrasi dan lainnya.

Namun berhenti merokok merupakan keputusan tepat untuk memelihara kesehatan.

Berhenti merokok membutuhkan kesadaran, komitmen kuat serta percaya diri bahwa itu bisa dilakukan. Tidak ada rumusan pasti atau resep ampuh untuk berhenti dari kebiasaan ini. Banyak langkah yang telah berhasil untuk menghentikan kebiasaan ini antara lain (1) membulatkan tekad untuk berhenti merokok, (2) jadikan rokok sebagai musuh, (3) berhenti merokok secara langsung, (4) hentikan minuman yang merangsang rokok, (5) lakukan aktivitas setelah makan, (6) olahraga teratur, (7) jangan dekati rokok, (8) isi waktu luang, (9) kurangi nongkrong dan begadang, (10) perbanyak makan buah dan sayur.

***Syafuddin Ritonga**
MAP, penulis seorang diabetisi dan dosen Universitas Medan Area (UMA)

WASPADA

B6

Sikap Ksatria Polri

Oleh Dr Warjio

sebagai momen penting bagi Polri secara institusional
menunjukkan dirinya di hadapan publik bahwa
akan melakukan reformasi internal

yang diberitakan
ini meyakini kasusnya
Bambang Widjojo
mengajukan surat
sebagai komisioner
Korupsi (KPK).
Jenderal Budi Gunawan
sebagai tersangka
sebagai Kepala
Kepolisian Republik
BW dan BG—
institusi publik yang
menjadi
BW diadukan tersangka
pengarahan saksi
Pemerintah
Pemilik Kota-
Konstitusi tahun
tersebut karena
berhenti se-
moral hukum dan
konstitusi, undang-
publik, sampai
dari BG untuk

oleh banyak
Wakil Komisaris
Sebagian, untuk
walaupun
tersebut, na-
keputusan
tidak bisa ikut campur.

Sikap Ksatria Polri
Waspada Badrodin
sikap ksatria karena
besar dan meng-
memberikan peng-
sebagaimana
ksatria ini seme-
diadakan
permasalahan
dengan
sikap ksatria
dan tidak dibarengi
reformasi internal

Polri Brigjen (Pol) Herry Prastowo. Dari ketiganya tidak ada yang hadir memenuhi panggilan KPK. Padahal mereka untuk kedua kalinya, setelah tidak hadir pada panggilan pertama. Sebelumnya juga ada tiga perwira Polri yang tidak hadir memenuhi panggilan pertama KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Andayono, Wakil Kepala Polres Jombang Komisaris Polisi Sumardji dan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.

Belum adanya sinyal meletakkan jabatan dari BG secara pribadi ataupun dorongan secara institusional Polri dan tidak hadirnya pejabat Polri oleh KPK sebenarnya menunjukkan ada persoalan internal Polri terkait sikap ksatria dalam soal korupsi. Kenyataan ini tentu saja akan semakin memberikan ruang lebih besar kepada publik untuk tidak memercayai institusi Polri dalam urusan pemberantasan korupsi apalagi yang menyangkut elitnya. Polri dinilai tidak ada kesungguhan membeberantas korupsi khususnya yang menyangkut kepentingan internalnya. Malah dengan menetapkan tersangka terhadap BW, publik memaknainya sebagai bentuk pelemahan KPK. Di sisi lain, kenyataan ini juga membuktikan sikap ksatria yang seharusnya ditunjukkan Polri, hanya sekedar persoalan kata-kata tanpa ada makna yang terimplimentasi dengan tindakan. Padahal sikap ksatria adalah sikap yang fundamental bagi institusi keamanan seperti Polri. Hal ini disebabkan sikap ksatria adalah sikap yang menyangkut marwah institusional.

Reformasi Polri

Sikap ksatria BG untuk segera meletakkan jabatannya sebagaimana yang telah dilakukan BW sesungguhnya sedang ditunggu masyarakat. Demikian juga pejabat di lingkungan Polri terkait kasus BG untuk kooperatif menjalani pemeriksaan KPK. Ini sebenarnya momen penting bagi Polri secara institusional untuk menunjukkan dirinya di hadapan publik bahwa Polri telah melakukan reformasi internal. Sebagaimana tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma Polri, reformasi Polri bertujuan mengubah pola pikir dan karakter-

menjalankan tugas di lapangan.

Reformasi Polri juga ditujukan untuk membangun Polri sesuai prinsip demokrasi, dimana akuntabilitas dan transparansi selalu menjadi dasar dalam kegiatan Polri. Akuntabilitas kepolisian secara umum didasarkan pada keinginan untuk mencegah penyalagunaan wewenang kepolisian, melindungi kebebasan masyarakat serta pengawasan terhadap lembaga ini. Selain itu, pentingnya akuntabilitas juga akan berpengaruh kepada legitimasi aparat kepolisian di mata masyarakat (Sarah Nuraini Siregar, 2011).

Saya khawatir jika BG tidak menunjukkan sikap ksatrianya dalam merespon tuntutan publik, reformasi Polri yang telah dicanangkan selama ini akan kontraproduktif dengan semangat demokrasi dan kinerja Presiden Jokowi yang mengedepankan kepentingan masyarakat dengan berbasis pada penegakan hukum. Karena itu secara institusional Polri juga harus mendorong dan membuat kebijakan agar BG bisa secara ksatria mengikuti langkah BW dalam penegakkan supremasi hukum. Ini merupakan bentuk moral hukum yang harus dilakukan Polri untuk menjawab keraguan publik terhadap Polri sehingga legitimasi institusional yang diharapkan Polri mendapat dukungan masyarakat luas. Masyarakat akan menunggu sikap ksatria itu.

Peran Jokowi

Ketidakhadiran BG memenuhi pemeriksaan oleh KPK terkait statusnya, tentu bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi, sebagaimana yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Praktilkno (30/1/2015) agar Polri membantu KPK dalam penyelidikan Budi Gunawan. Bantuan yang dimaksud adalah menghadirkan saksi-saksi dan tersangka ke KPK. Sebelumnya Presiden Jokowi telah membentuk Tim Independen terdiri dari

tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik antara Polri-KPK. Presiden Jokowi nampaknya berharap banyak dari tim yang beranggotakan sembilan tokoh masyarakat.

Langkah Presiden Jokowi menyelesaikan konflik Polri-KPK dengan menggunakan Tim Independen menjadi pertanyaan publik: Apakah Presiden Jokowi mau melibatkan masyarakat luas untuk menyelesaikan konflik Polri-KPK karena dia tidak mampu? Saya berpendapat Presiden Jokowi berada dalam posisi dilematis. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang Tim Independen, Buya Syafii Maarif. Pencalonan BG sebagai Kapolri bukan dari Presiden Jokowi tetapi dari pimpinan elit partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2015. Artinya, sebenarnya Presiden Jokowi mendapat titipan nama BG dari elit

Polri-KPK akan terus bergulir dan kisruh. Langkah politik Jokowi akan terus menjadi sorotan. Kesalahan langkah dan tindakan yang bertentangan dengan keinginan publik atau hukum, tentu akan mempengaruhi kredibilitas Presiden Jokowi di mata publik.

Penulis adalah Ketua Program

lawan politiknya dalam Pilpres 2014. Saya kira hal terpenting yang dibicarakan Presiden Jokowi dan Prabowo adalah kemungkinan dukungan Prabowo dan Partai Gerindra dan juga Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mendukung langkah strategis Presiden Jokowi khususnya dalam penyelesaian konflik Polri-KPK. Politik Kebijakan Jokowi terkait konflik

Dilema Menurunkan Tarif Angkutan Umum

Oleh: Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

17 Januari 2015, "pihaknya sudah melakukan rapat dengan Organda, pengelola angkutan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam rapat telah disepakati, ongkos angkutan umum untuk masyarakat turun dari Rp. 5.500 per estafet atau per 10 kilometer menjadi Rp. 4.600 rupiah. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa, turun dari Rp.3.500 menjadi Rp.3.000. Dalam pertemuan ini, pihak Organda juga meminta agar Dinas Perhubungan dapat menertibkan becak bermotor, supaya tidak tumpang tindih dengan trayek angkot, penertiban terminal liar, serta mengecek harga onderdil di pasaran yang cenderung tetap bertahan di harga yang sudah naik sebelumnya saat BBM bersubsidi naik menjadi Rp.8.500.

Dalam realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kesepakatan Dinas Perhubungan dengan Organda dan awak sopir untuk menurunkan tarif angkutan belum terealisasi. Pemerintah-pun terkesan tidak mampu mengawasi perilaku sopir angkutan umum yang tetap memberlakukan tarif lama. Pada sisi lain, penumpang angkutan umum khususnya angkutan kota tidak jarang bersikap nakal, karena banyak warga yang mengaku berstatus sebagai mahasiswa dengan maksud

bisa membayar dengan ongkos murah. Dengan demikian, maksud pemerintah untuk menurunkan kembali tarif angkutan juga mengundangi dilema bagi para awak sopir karena kerap terjadi konflik dengan penumpang yang mengaku sebagai mahasiswa.

Akar Masalah Penurunan Tarif Angkutan Umum

Persoalan utama untuk menurunkan tarif angkutan umum di Kota Medan, termasuk di beberapa daerah lainnya bukan hanya terfokus pada masalah kenaikan atau turunnya harga BBM, melainkan bermuara pada tata kelola operasional trayek angkutan umum oleh instansi terkait dan tingginya harga suku cadang *sparepart* yang cenderung tetap berada pada harga semula walau harga BBM sudah 2 kali mengalami penurunan.

Menurut pengakuan salah seorang sopir angkot CV. Rahayu Medan Ceria 97-A yang sering penulis tumpang dengan trayek Amplas-Unimed mengatakan, "tata kelola angkutan umum di Kota Medan khususnya Angkutan Kota sangat jelek. Jumlah Angkutan Kota dengan jumlah penumpang semakin tidak sepadan, sementara setoran kepada toke harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang disepakati". Pernyataan sopir angkot ini tentu

CV. Kobun, PT. Rahayu Medan Ceria, CV. Laju Deli Sejahtera, CV. Medan Bus, P.T.U. Morina, CV. Wampu Mini, FA. Mekar Jaya, KPUM, PU. Gajah Mada.

Namun, dalam kenyataannya jumlah armada yang mengisi masing-masing trayek jauh berbeda dengan data yang disampaikan Dinas Perhubungan Kota Medan. Dengan kata lain, armada yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Medan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angkutan umum yang melakukan operasional pada trayek-trayek dimaksud. Dengan kondisi ini, terang saja menyebabkan jumlah angkutan umum tidak sesuai lagi dengan jumlah penumpang yang mereka layani setiap harinya. Konon, kebijakan pemerintah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan moda transportasi dengan cara dua menambah sepiunya penumpang, sehingga moda transportasi angkutan umum khususnya angkutan kota

kan instansi terkait. Konon, semakin maraknya mobil rental menambah persaingan yang semakin tidak sehat. Menyikapi hal ini, sepertinya Dinas Perhubungan dan instansi terkait tutup mata, karena loket dan stasiun mobil rental yang menggunakan plat hitam atau pribadi dengan bebasnya beroperasi tanpa ada tindakan tegas.

Harga *Sparepart* kendaraan bermotor yang masih bertahan pada posisi semula, juga menjadi problem utama bagi awak sopir untuk menurunkan tarif angkutan. Wacana Pemko Medan yang akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjual *sparepart* (suku cadang) untuk mengendalikan harga *sparepart* Mobil Penumpang Umum (MPU) seiring dengan naiknya harga BBM bersubsidi yang berdampak kenaikan seluruh harga kebutuhan, hingga kini masih sebatas wacana tanpa realisasi.

diberikan. Bahkan sesuatu yang sangat lumrah apabila tenaga pengajar tersebut pun memberikan hukuman bukan dengan nilai jelek saja akan tetapi dengan menyuruh untuk berdiri di atas kursi dengan satu kaki sampai berdirinya selesai, dan masih banyak lagi hukuman yang lain.

Cara memberikan hukuman terhadap anak didik seakan telah menjadi budaya bagi dunia pendidikan di negara Indonesia. Tenaga pengajar dalam memberikan hukuman terhadap anak didik memang pada dasarnya bukan tanpa sebab. Ini diberikan dengan maksud supaya mereka menjadi lebih disiplin dan lebih giat dalam belajar. Namun, apakah dengan cara menghukum seperti ini bisa efektif bagi mereka?

Pertanyaan diatas merupakan hal yang sangat mendasar untuk kita jadikan sebagai renungan. Bagaimana tidak, bila cara mendidik yang seperti ini terus dilakukan niscaya akan memberikan fobia tersendiri bagi mereka. Pengalaman yang dialami penulis pada saat duduk dibangku sekolah juga banyak menyimpan cerita tentang hukuman yang selalu diberikan terhadap peserta didik. Mulai dari berdiri diatas kursi, ditampar, dipukul pakai penggaris, tangan

dipukul pakai penghapus papan, menghormati bendera di siang terik, lari keliling lapangan dan masih banyak lagi, tidak mungkin penulis sampaikan satu persatu. Menurut penulis sendiri yang pernah merasakan hal yang seperti itu, bersekolah telah membuat kita tidak nyaman, mematikan semua inisiatif dan menurunkan semangat untuk belajar.

Meski hal yang mungkin positifnya membuat lebih disiplin, tapi masih kata-kata mungkin sampai saat ini cara tersebut membuat anak menjadi semakin terpuruk.

Cara mendidik dengan memberikan hukuman terhadap peserta didik juga mengakibatkan mereka tidak mampu berkembang secara individu. Temuan – temuan ilmu baru tentang otak manusia menyatakan ternyata otak itu tidak statis melainkan dapat mengecil dan sebaliknya dapat tumbuh dan berkembang. Semua itu tergantung dari ancaman atau dorongan kah yang didapat dari orang sekitarnya termasuk tenaga pengajar.

Hal ini membuktikan bahwa memberikan hukuman terhadap peserta didik akan memberikan dampak tidak bagus bahkan memberikan ketakutan yang berlebihan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan

bangan pengetahuan peserta didik. Bisakah kita menghasilkan generasi – generasi hebat dengan cara menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut? mari kita renungkan secara bersama – sama supaya kita mampu mengubah kebiasaan cara mendidik yang telah berlangsung lama dinegeri tercinta Indonesia, sehingga diharapkan kita mampu intropeksi diri dan berbenah.

Kalau kita berkaca terhadap cara mendidik di luar negeri. Seharusnya kita malu selalu memberikan hukuman terhadap peserta didik. Mengutip tulisan dari Prof. Rhenal Kasali “saya ingat betul bagaimana guru – guru di amerika memajukan para anak didiknya. Saya berfikir pantaslah anak – anak disana mampu menjadi seorang penulis dengan karya – karya ilmiah yang begitu hebat, bahkan mampu menerima hadiah nobel. Bukan karena mereka punya guru yang pintar secara akademisi, melainkan mereka mempunyai guru yang memiliki karakter yang sangat kuat, membangun, bukan merusak.

Bila peserta didik mendapat kesulitan dalam pelajaran mereka, rapornya tidak diberi nilai merah terlebih hukuman, melainkan dengan memberikan dorongan untuk bekerja

lebih keras”. Sungguh sangat berbeda dengan kondisi cara mendidik dinegara Indonesia. Mengapa kita tidak bisa melaksanakan “encouragement “ didalam dunia pendidikan kita? Apakah ini merupakan wujud bala dendam karena tenaga pengajar yang sekarang juga merupakan generasi yang dibentuk oleh sejuta ancaman tersebut? Sampai kapan dunia pendidikan kita akan terus seperti ini.

Di media elektronik juga sering diberitakan kekejaman seorang tenaga pengajar yang melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didiknya, bahkan sampai harus mendapatkan perawatan. Kejadian – kejadian seperti inilah yang menciptakan citra buruk terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Menerapkan Encouragement

Mencermati berbagai problematika yang dihadapkan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, sudah sepantasnya lah para tenaga pengajar menerapkan strategi “encouragement” dimaksud. Ini sangat dianggap penting untuk mencetak generasi – generasi yang piawai dan mempunyai karakter mapan. Tenaga pengajar juga diharapkan mempunyai rasa memiliki terhadap masa depan bangsa

(human of bellogging) yaitu dengan bukan hanya sebatas simbolis sebagai tenaga pengajar melainkan, mampu memberikan pemahaman terhadap peserta didik supaya mereka bisa terus maju. Dengan kata lain, strategi cara mendidik ini akan memberikan banyak hasil yang positif..

Bila cara mendidik seperti ini diterapkan di Indonesia, secara otomatis akan mampu menghasilkan peserta didik yang unggul. Mampu melanjutkan estafet kepemimpinan sehingga mampu membawa nama Indonesia di kancah dunia. Peserta didik juga akan terus berkarya seperti yang di utarakan Prof. Rhenal Kasali diatas.

Selain itu, tenaga pengajar juga diharapkan bisa membangun karakter peserta didik, selalu memberikan motivasi belajar, memberikan pemahaman yang mudah diterima oleh mereka. Sehingga dengan generasi penerus bangsa dimasa depan bisa membawa negara Indonesia menjadi maju. Pendidikan dianggap begitu amat penting karena bangsa yang besar akan terwujud apabila ditopang dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas yaitu dengan pendidikan.***

Penulis adalah Staf Rektor Universitas Medan Area

HARIAN

Analisa

Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 5

Dari Seminar IFRS FE UMA Standar Pelaporan Keuangan Internasional Perlu Diterapkan

Medan, (Analisa)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area (Prodi FE UMA) menggelar Seminar Implementasi Konvergensi International Financial Reporting Standard, (IFRS) di kampus Jalan Sei Serayu Medan, belum lama ini.

Kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan dan diikuti 70 peserta berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa.

Tampil sebagai narasumber, dosen UMA Karlonta Nainggolan SE MS AC dan Prof Ade Fatma dari USU.

Dekan FE UMA Prof Dr H Sya'ad Afifuddin SE MEc mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Kamis (5/2). Dijelaskannya, dari seminar itu diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan.

Sejak 1 Januari 2012 Indonesia, katanya telah memutuskan untuk menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN.

Pengakuan Maksimal

Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS perlu dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan pema-
ngku kepentingan yang tersebar secara global.

Dipaparkannya, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Ditampingi Sekretaris Warsani Purnamasari SE MM dan Wakil Dekan Bidang Akademik FE UMA Hery Syahrial SE MSi. Ketua pelaksana yang juga

HARIAN REALITAS

Senin, 9 Feb 2013

Hal. 5.

FE UMA Gelar Seminar IFRS

Medan, Realitas

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area menggelar Seminar Implementasi Konvergensi International Financial Reporting Standard, (IFRS) di kampus Jalan Sei Serayu Medan, belum lama ini.

Seminar Implementasi Konvergensi IFRS berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) itu diikuti 70 peserta berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa. Tampil sebagai narasumber Karlonta Nainggolan SE MS AC (dosen UMA) dan Prof Ade Fatma dari USU.

Dekan FE UMA Prof Dr H Sya ad Afifuddin SE MEc ketika membuka seminar itu berharap mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan nantinya.

Seperti diketahui, sejak Januari 2012 Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau

IFRS. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN. Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS perlu dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.

Dia menyatakan UMA sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan seminar tersebut. Menurutnya, dengan mengaplikasikan standar akuntansi yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan baik pada perusahaan maupun pemerintah, hal tersebut akan berdampak besar pada pengambilan kebijakan. Disebutkannya, utamanya bagi pemerintah, laporan keuangan akuntabel yang disampaikan kepada kantor pajaklah yang nantinya akan dijadikan laporan kepada pemerintah.

Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan oleh pemangku kepentingan yang tersebar secara global.

Dia menyebutkan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan seminar yang juga Ketua Prodi Akuntansi Linda Lores SE MSi mengatakan, jika melihat tantangan pembangunan dan perkembangan ekonomi, maka sangatlah penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan.

"Dengan demikian dapat mendukung pembangunan dalam hal peningkatan transparansi keuangan, kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan," katanya didampingi Sekretaris Warsani Purnamasari SE MM dan Wakil Dekan Bidang Akademik FE UMA Hery Syahrial SE MSi.

Seminar implementasi konvergensi IFRS ini merupakan rangkaian kegiatan dari program kerja Prodi Akuntansi FE UMA. Secara rutin UMA menggelar seminar-seminar yang bertujuan meningkatkan SDM mahasiswa dan dosennya. (r-ji)

Prodi Akuntansi FE UMA Gelar Seminar IFRS

MEDAN | MANDIRI

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area menggelar Seminar Implementasi Konvergensi International Financial Reporting Standard, (IFRS) di kampus Jalan Sei Serayu Medan, belum lama ini.

Seminar Implementasi Konvergensi IFRS berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) itu diikuti 70 peserta berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa. Tampil sebagai narasumber Karlonta Nainggolan SE MS AC (dosen UMA) dan Prof Ade Fatma dari USU.

Dekan FE UMA Prof Dr H Sya'ad Afifuddin SE MEc ketika membuka seminar itu berharap mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan nantinya.

Seperti diketahui, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN. Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS perlu dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.

Dia menyatakan UMA sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan seminar tersebut. Menurutnya, dengan mengaplikasikan standar akuntansi yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan baik pada perusahaan maupun pemerintah, hal tersebut akan berdampak besar pada pengambilan kebijakan.

Disebutkannya, utamanya bagi pemerintah, laporan keuangan akuntabel yang disampaikan kepada kantor pajaklah yang nantinya akan dijadikan laporan kepada pemerintah.

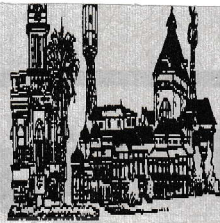
Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan oleh pemangku kepentingan yang tersebar secara global.

Dia menyebutkan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan seminar yang juga Ketua Prodi Akuntansi Linda Lores SE MSi mengatakan, jika melihat tantangan pembangunan dan perkembangan ekonomi, maka sangatlah penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan.

"Dengan demikian dapat mendukung pembangunan dalam hal peningkatan transparansi keuangan, teknologi dan kegunaan laporan keuangan," katanya didampingi Sekretaris Wasis Purnamasari SE MM dan Wakil Dekan

Berita Sore



9 FEB '12

Hal : 4

FE UMA Gelar Seminar IFRS

Medan Berita): Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan, Fakultas Studi Akuntansi Universitas Medan Area menggelar Seminar Implementasi Konvergensi International Financial Reporting Standard, (IFRS) di Aula Sei Serayu Medan pada Selasa (7) Februari ini.

Seminar Implementasi Konvergensi IFRS berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 peserta berasal dari dosen dan mahasiswa sebagai nara-

sumber Karlonta Nainggolan SE MS AC (dosen UMA) dan Prof Ade Fatma dari USU.

Dekan FE UMA Prof Dr H Sya'ad Afifuddin SE MEc ketika membuka seminar itu berharap mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan nantinya.

Seperti diketahui, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN. Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS

perlu dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.

Dia menyatakan UMA sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan seminar tersebut. Menurutnya, dengan mengaplikasikan standar akuntansi yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan baik pada perusahaan maupun pemerintah, hal tersebut akan berdampak besar pada pengambilan kebijakan. Disebutkannya, utamanya bagi pemerintah, laporan keuangan akuntabel yang disampaikan kepada kantor pajaklah yang

nantinya akan dijadikan laporan kepada pemerintah.

Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan oleh pemangku kepentingan yang tersebar secara global.

Dia menyebutkan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan seminar yang juga Ketua Prodi Akuntansi Linda Lores SE MSi mengatakan, jika melihat tantangan pembangunan dan perkembangan ekonomi, maka sangatlah penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan.

"Dengan demikian dapat mendukung pembangunan dalam hal peningkatan transparansi keuangan, kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan," katanya didampingi Sekretaris Warsani Purnamasari SE MM dan Wakil Dekan Bidang Akademik FE UMA Hery Syahril SE MSi.

Seminar implementasi konvergensi IFRS ini merupakan rangkaian kegiatan dari program kerja Prodi Akuntansi FE UMA. Secara rutin UMA menggelar seminar yang bertujuan



FE UMA Gelar Seminar IFRS

Medan, BPB

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area menggelar Seminar Implementasi Konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) di kampus Jalan Sei Serayu Medan, belum lama ini.

Ketua Pelaksana kegiatan seminar yang juga Ketua Prodi Akuntansi Linda Lores SE MSI mengatakan, jika melihat tantangan pembangunan dan perkembangan ekonomi, maka sangatlah penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan.

"Dengan demikian dapat mendukung pembangunan dalam hal peningkatan transparansi keuangan, kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan," kata Linda Lores didampingi Sekretaris Warsari Permatasari SE MM dan Wakil Ketua Prodi Akuntansi FE UMA Heri Syatrial SE MSI, Kamis (5/2).

vergens IFRS berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) itu diikuti 70 peserta berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa. Tampil sebagai narasumber Karlonta Nainggolan SE MS AC (dosen UMA) dan Prof Ade Fatma dari USU.

Dekan FE UMA Prof Dr H Sya'ad Afifuddin SE MEc ketika membuka seminar itu berharap mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan nantinya.

Seperti diketahui, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN. Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS perlu dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.

Dia menyatakan UMA sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan seminar tersebut. Menurutnya, dengan

akuntansi yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan baik pada perusahaan maupun pemerintah, hal tersebut akan berdampak besar pada pengambilan kebijakan. Disebutkannya, utamanya bagi pemerintah, laporan keuangan akuntabel yang disampaikan kepada kantor pajaklah yang nantinya akan dijadikan laporan kepada pemerintah.

Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan oleh pemangku kepentingan yang tersebar secara global.

Dia menyebutkan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Seminar implementasi konvergensi IFRS ini merupakan rangkaian kegiatan dari program kerja Prodi Akuntansi FE UMA. Secara rutin UMA menggelar seminar-seminar yang bertujuan meningkatkan SDM

Harian JURNAL ASIA

Jurnal Asia
Jumat, 6 Februari 2015

9

Mahasiswa Dituntut Mampu Susun Laporan Sistem IFRS

Medan | Jurnal Asia

Mahasiswa dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan dengan standar internasional dalam mengimplementasikan konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS).

"Kita berharap agar mahasiswa dapat lebih memahami dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan dengan standar internasional tersebut," kata Dekan fakultas ekonomi Universitas Medan Area Prof Dr H Sya'ad Afifuddin SE MEc di kampus tersebut Jalan Sei Serayu Medan, Kamis (5/2).

Untuk itu pihaknya menyelenggarakan seminar implementasi tentang IFRS yang diikuti 70 mahasiswa dan dosen program studi akuntansi fakultas ekonomi. Sedangkan narasumber Karlonta Nainggolan SE MS AC dan Prof Ade Fatma dari USU.

Menurutnya, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS.

"Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah, seperti BUMD dan BUMN. Perpindahan dari akuntansi Indonesia ke IFRS perlu dilakukan agar mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini," katanya

Dia menyatakan dengan seminar ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan standar akuntansi yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan baik pada perusahaan maupun pemerintah. Sebab hal tersebut akan berdampak besar pada pengambilan kebijakan.

Narasumber Karlonta Nainggolan mengungkapkan seiring dinamika bisnis era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca, dan digunakan oleh pemangku kepentingan yang tersebar secara global.

Dia menyebutkan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nasional ke Standar Akuntansi Internasional menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS.

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan seminar yang juga Ketua Prodi Akuntansi Linda Lores SE MSI mengatakan, "Seiring dengan perkembangan dan perkembangan ekonomi, maka sangatlah penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan mengikuti perkembangan standar

B4

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

WASPADA

WASPADA
Senin
9 Februari 2015

UNIVERSITAS MEDAN ARRA

Serangan Balik Koruptor

Bisa dipastikan bahwa para koruptor akan bertepuk tangan dan bersorak kegirangan dari konflik Polri-KPK. Pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sebagaimana yang saya petik di atas bukan isapan jempol bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK akan mengalami kematiian dan musibah bagi bangsa Indonesia jika terus dilemahkan. Demikian juga ada pembangkangan amanat reformasi. Saya percaya, bahwa para koruptor akan menggunakan setiap momen, kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap KPK. Serangan balik itu dapat dilakukan baik secara kelamban maupun non kelamban dengan berbagai upaya dan cara.

Terkait persoalan konflik Polri-KPK, setidaknya ada beberapa caray yang dilakukan oleh para koruptor melakukan serangan balik terhadap KPK. *Pertama*, menggunakan lembaga Polri sebagai institusi untuk menyerang KPK. Salah satu lembaga negara di luar KPK yang juga berperan dalam hal memberantas korupsi adalah Polri. Persoalannya sekarang, pemberantasan korupsi oleh Polri justru terkait dengan pejabat tinggi di lingkungan elit Polri. Bagi para koruptor, dilema pemberantasan korupsi oleh Polri digunakan untuk masuk dan memanfaatkan keadaan. Di sisi lain, Polri adalah lembaga sistemis yang memiliki pengaruh yang besar dan memiliki jejaring informasi tentang kasus-kasus warga negara termasuk anggota KPK yang sewaktu-waktu bisa dibuka kembali kasus itu. Jika anggota KPK yang dianggap memiliki kasus hukum, maka pihak Polri dengan alasan hukum dapat menyerat. Semakin banyak anggota KPK yang dianggap terlibat kasus hukum, maka akan semakin lemah peran KPK dan pelan-pelan akan mati dengan sendirinya.

Kedua, serangan melalui pembentukan opini publik. Beredarnya foto-foto panas dan tidak memenuhi

Masyarakat pun kini dibuat terbelah: di satu pihak tetap percaya pada KPK tapi di lain pihak, masyarakat mulai muncul ketidakpercayaan pada KPK. Sebagai contoh, KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, dua kelompok pengunjuk rasa saling berhadapan. Kelompok itu adalah massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang menyatakan mendukung KPK. Kelompok lainnya menyatakan mendukung KPK dan mendukung Polri. Kedua kelompok ini merupakan dua kelompok yang mewakili dua opini yang berbeda.

Penutup

Karena itu, untuk menghindari kerugian kenegaraan juga masyarakat, Presiden Jokowi harus segera mengambil kebijakan tegas dan menunjukkan kewibawaannya sebagai presiden yang memiliki kekuasaan yang dipilih masyarakat. Presiden Jokowi harus berani keluar dalam jebakan dilema kekuasaan elit partai politik pendukungnya karena sesungguhnya ia adalah wakil rakyat yang dimenangkan jadi presiden dan bukan wakil partai yang berfungsi mengamankan kepentingan elitnya.

Ini sebenarnya momen penting bagi Presiden Jokowi untuk secara serius membangun pemerintahan dan menguatkan institusinya tanpa harus terbelenggu dengan kelompok atau elit yang hanya menguntungkan diri mereka. Kita tentu tidak ingin serangan balik yang dilakukan para koruptor ini akan mematikan pemberantasan korupsi oleh KPK. Kita juga ingin agar Polri menjadi lembaga bersih yang bebas dari korupsi. Kita juga ingin sekali Polri-KPK secara bersama-sama menyerang balik para koruptor.

Kerugian Negara Dan Masyarakat

Serangan balik para koruptor, jelas akan

Penulis adalah Ketua Program

HARIAN Analisa



Rabu, 11 Februari 2015

Halaman 10

PKM-IMKA UMA Gagasan "Character Building Training"

Berita, (Analisa)

Komunitas Pemuda Karo Medan (PKM) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Arih Ersada (MA) menggelar pelatihan *Character Building Training* selama dua hari.

Kegiatan itu dilaksanakan Jumat (30/1) Sabtu (31/1) di Convention Hall Kampus I Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate.

Demikian disampaikan Koordinator PKM sekaligus anggota IMKA Arih Ersada (MA) Denhas Maha didampingi Ketua Humas UMA kepada Analisa, Senin (9/2) di kampus I UMA.

Ditindaklanjuti pelatihan itu diikuti pemuda dan mahasiswa Karo dari ber-

bagai sekolah dan universitas se Kota Medan, dengan pelatih, Dra Herlina Surbakti MA. "Dipilihnya Dra Herlina Surbakti MA, karena telah berpengalaman menjadi seorang pendidik di dalam dan luar negeri selama 30 tahun," ucap Denhas.

Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Karo, yang memiliki kompetensi dan berjiwa andal, yang siap menghadapi era globalisasi.

Sebab, lanjut Denhas, menerapkan pendidikan berkarakter kepada generasi muda Karo sangat penting dilakukan. Hal tersebut guna meraih kesuksesan.

Raih Sukses

Keinginan yang kuat itu tak lain,

karena generasi muda Karo ingin meraih kesuksesan. Kesuksesan itu sendiri kelak ditentukan besarnya mimpi, dan ketakutan akibat kekecewaan yang pernah dialami.

Karenanya generasi muda Karo harus memiliki karakter yang baik, berinovatif sesuai dengan tatanan perilaku dan norma-norma serta peraturan perundang yang ada.

Ditambahkannya, acara pelatihan dibuka secara resmi Wakil Rektor UMA Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir Zulheri Noer MP didampingi Pembina Mahasiswa Karo UMA, Usman Tarigan MSi dan Rehia K Isabella, beru Barus S.Sos.MSP. (twh)

HARIAN
REALITAS
BERANI BICARA FAKTA

Rabu, 11 Pebruari 2015

3

PKM-IMKA UMA Gagasan "Character Building Training"

Medan, Realitas

Komunitas Pemuda Karo Medan (PKM) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Arih Ersada UMA menggagas pelatihan Character Building Training selama dua hari. Kegiatan itu dilaksanakan Jumat (30/1)-Sabtu (31/1) di Convention Hall Kampus I Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate.

Demikian disampaikan Koordinator PKM sekaligus anggota IMKA Arih Ersada UMA. Denhas Maha didampingi Kabag Humas UMA kepada Analisa. Senin (9/1) di kampus I UMA.

Dijelaskannya, pelatihan itu diikuti pemuda dan mahasiswa Karo dari berbagai sekolah dan universitas se Kota Medan, dengan pelatih, Dra Herlina Surbakti MA.

"Dipilihnya Dra Herlina Surbakti MA, karena telah berpengalaman menjadi seorang pendidik di dalam dan luar negeri selama 30 tahun," ucap Denhas. Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Karo, yang memiliki kompetensi dan berjiwa andal, yang siap menghadapi era globalisasi.

Sebab, lanjut Denhas, menerapkan pendidikan berkarakter kepada generasi muda

Karo sangat penting dilakukan. Hal tersebut guna meraih kesuksesan.

Keinginan yang kuat itu tak lain, karena generasi muda Karo ingin meraih kesuksesan. Kesuksesan itu sendiri kelak ditentukan besarnya mimpi, dan ketakutan akibat kekecewaan yang pernah dialami.

Ditambahkannya, acara pelatihan dibuka secara resmi Wakil Rektor UMA Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir Zulheri Noer MP didampingi Pembina Mahasiswa Karo UMA, Usman Tarigan MSI dan Rehia K Isabella, beru Barus S.Sos, MSP. (r-ji).

Medan-andalas

Kamis

12 Februari 2015

Hal. **14**

PKM dan Imka UMA Gagas Pelatihan Character Building

Medan-andalas

Komunitas Pemuda Karo Medan (PKM) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Karo (Imka) Arief Ersada Universitas Medan Area (UMA) menggagas pelatihan Character Building Training selama dua hari.

"Kegiatan dilaksanakan Jumat-Sabtu pekan lalu di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate," kata Koordinator PKM sekaligus Anggota Imka Arief Ersada UMA Denhas. Dia didampingi Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP kepada wartawan, Rabu (11/2) di kampus I UMA.

Dijelaskannya, pelatihan itu diikuti pemuda dan mahasiswa Karo dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Medan. Bertindak sebagai pelatih Dra Herlina Surbakti MA.

"Dipilihnya Herlina Surbakti karena telah berpengalaman menjadi seorang pendidik di dalam dan luar negeri selama 30 tahun," ucap Denhas.

Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Karo yang memiliki kompetensi dan berjiwa andal dan siap menghadapi era globalisasi. Sebab, lanjut Denhas, menerapkan pendidikan berkarakter kepada generasi muda Karo sangat penting dilakukan guna meraih kesuksesan.

"Keinginan yang kuat itu tak lain, karena generasi muda Karo ingin meraih kesuksesan. Kesuksesan itu sendiri kelak ditentukan besarnya mimpi, dan ketakutan akibat kekecewaan yang pernah dialami. Karenanya generasi muda Karo harus memiliki karakter yang baik, berinovasi sesuai dengan norma-norma serta peraturan perundang yang ada," kata Denhas.

MINGGU

Analisa

1 Maret 2015.

8

Mahasiswa Magister Hukum UMA *Fieldtrip* ke KPK & Unpad

Medan, (Analisa) Sebanyak 34 mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (PPs UMA) melaksanakan *fieldtrip* ke Jakarta dan Bandung.

Di Jakarta, baru-baru ini rombongan dipimpin Direktur PPs UMA, Ir. Retna Astuti Kuswardani MS dan Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr Sigid Suseno SH, MHum. "Nota kesepahaman ruang lingkupnya adalah pengembangan institusi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagiandari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan pertukaran staf, mahasiswa atau pengajar," tambah Direktur PPs UMA, Prof Retna A Kuswardani didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP.

Direktur PPs UMA ini menjelaskan kesepakatan kerjasama itu berlangsung selama lima tahun sejak ditandatangani. "Adanya kerjasama ini diharapkan semakin meningkatkan kompetensi lulusan PPs Magister Ilmu Hukum UMA," ujar Prof Retna seraya menyebutkan PPs UMA juga telah menjalin berbagai kerjasama dengan universitas lainn.

Terkait *fieldtrip*, Prof Retno menyatakan sebagai studi banding bagi mahasiswa melihat realita praktik hukum dan aplikasinya di tengah masyarakat.

Dari dua lokasi kunjungan tersebut, pihak KPK dan Unpad sangat mengapresiasi tinggi dan berharap tahun-tahun mendatang tetap berlanjut. (twh)

HARIAN REALITAS

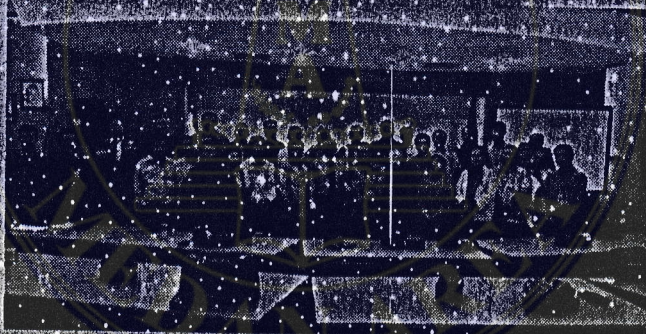
Rabu, 18 Februari 2015

10

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPs UMA Field Trip ke KPK dan Unpad

Medan, Realitas
Sebanyak 34 mahasiswa
Magister Ilmu Hukum Pas-
sarjana Universitas Medan
(PPs UMA) melaksan-
kan field trip selama dua hari
ke Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Universitas Pad-
jajaran (Unpad)

Djakarta, Kamis (5/2)
Rombongan yang dipimpin
Dekan PPs UMA, Prof.
Retno Astuti Kuswar-
dani MS berkunjung ke kan-
selor Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) diterima Sp-
esial Pendidikan dan Kam-
panye KPK, Indra Marzuki
dalam kuliah umum tentang
Pemberantasan korupsi di In-



DIABADIKAN : Rombongan mahasiswa Magister Ilmu
Hukum PPs UMA dipimpin Prof. Dr. Ir. Retno Astuti
Kuswardani diabadikan dengan Dekan Fakultas Hukum
Unpad, Dr. Sigid Suseno M.Hum usai berkunjung dan
menandatangani nota kesepahaman di Kampus Unpad,
Jumat pekan lalu.

Prodi Ilmu Hukum, Dr. Tar-
sisius Murwadi SH, MH dan
Dekan Fakultas Hukum Un-
pad, ujar Muazzul.

Nota Kesepahaman

Pada saat di Fakultas Hu-
kum Unpad, PPs UMA juga
menandatangani nota kesepa-
ahaman dengan Universitas
Padjajaran (Unpad) Bandung.

Kesepakatan kerjasama itu
ditandatangani oleh Direktur
PPs UMA, Prof. Dr. Ir. Retno
Astuti Kuswardani MS dan
Dekan Fakultas Hukum Unpad,
Dr. Sigid Suseno SH, MHum.

"Nota kesepahaman ruang
lingkupnya adalah pengem-
bangan institusi dalam hal
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat se-
bagai bagian dari Tri Dha-
rma Perguruan Tinggi. Dan

dani didampingi Kabag Hu-
mas UMA, Ir. Asmah Indra-
wati MF.

Direktur PPs UMA men-
jelaskan kesepakatan kerjasa-
ma itu berlangsung selama
lima tahun sejak ditandatang-
ni. "Adanya kerjasama ini di-
harapkan semakin meningkat-
kan kompetensi lulusan PPs
Magister Ilmu Hukum
UMA," ujar Prof Retno seraya
menyebutkan PPs UMA juga
telah menjalin berbagai kerjasa-
ma dengan universitas lain.

Terkait field trip, Prof.
Retno menyatakan sebagai
studi banding bagi mahasiswa
melihat realita praktik hukum
dan aplikasinya di tengah
masyarakat.

Dari dua lokasi kunjungan
tersebut, mereka (KPK dan

WASPADA

WASPADA

Minggu

15 Februari 2015

A5

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UMA *Fieldtrip* Ke Jakarta Dan Bandung

MEDAN (Waspada): Sebanyak 34 mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (PPs UMA) melaksanakan *fieldtrip* selama dua hari, di Jakarta dan Bandung.

Di Jakarta, Kamis (5/2) rombongan yang dipimpin Direktur PPs UMA, Ir Retna Astuti Kuswardani MS berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima Spesialis Pendidikan dan Kampanye KPK, Indra Marzuki sekaligus kuliah umum tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum, Muazzu, SH MHum, Rabu (11/2) mengatakan, dalam kegiatan itu, para mahasiswa mengikuti kuliah

umum di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Undip disampaikan Miranda Risang Ayu, SH, LL.M, PhD dengan materi "Tantangan Penegakkan Hukum di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

"Usai kuliah umum, selanjutnya mengunjungi Perpustakaan Prof Mochtar Kusumaatmaja di bimbing Kepala Prodi Ilmu Hukum, Dr Tarsisius Murwadi SHMH dan Dekan Fakultas Hukum UNPAD," kata Muazzul.

Pada saat di Fakultas Hukum UNPAD, PPs UMA menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung.

Kesepakatan kerjasama itu

ditandatangani Direktur PPs UMA, Prof Dr Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS dan Dekan Fakultas Hukum UNPAD, Dr. Sigid Suseno, SH, MHum.

"Nota kesepahaman ruang lingkupnya adalah pengembangan institusi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pertukaran staf, mahasiswa atau pengajar," tambah Direktur PPs UMA, Prof Retna A Kuswardani didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP.

Direktur PPs UMA menjelaskan kesepakatan kerjasama itu berlangsung selama lima tahun sejak ditandatangani. (m49)

Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 12

Dari Fieldtrip Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPs UMA Tandatangani Kesepahaman dengan Fakultas Hukum Undip

Medan, (Analisa).

Sebanyak 34 mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (PPs UMA) melaksanakan fieldtrip selama dua hari, di Jakarta dan Bandung.

Di Jakarta, Kamis (5/2) rombongan yang dipimpin Direktur PPs UMA, Ir Retna Astuti Kuswardani MS berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima Spesialis Pendidikan dan Kampanye KPK, Indra Marzuki sekaligus kuliah umum tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Direktur PPs UMA, ungkap Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum, Muazzu, ISH MHum kepada Analisa, Rabu (11/2) di kampus II UMA Jalan Kolam Medan Estate, didampingi Prof Dr Edy Warman SH, MHum, Dr Ferry Aries Suranta SH, MHum dan Muazzul SH, MHum serta Roni Efrianti Lubis AMd.

Keesokan harinya, Jumat (6/2), lanjut Muazzul mengikuti kuliah umum di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Undip disampaikan Miranda Risang AyuSH,LLM PhD dengan materi "Tantangan Penegakkan Hukum di bidang-HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektua).

"Usai kuliah umum, selanjutnya mengunjungi Perpustakaan Prof Mochtar Kusumaatmaja di bimbing Ka Prodi Ilmu Hukum, Dr Tarsisius Murwadi SHMH dan Dekan Fakultas Hukum Undip," ujar Muazzul.

Nota Kesepahaman

Pada saat di Fakultas Hukum Undip, PPs UMA) juga menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Padjajaran (Undip) Bandung.

Kesepakatan kerjasama itu ditandatangani oleh Direktur PPs UMA, Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS dan Dekan Fakultas Hukum Undip, Dr Sigid Suseno SHM Hum.

"Nota kesepahaman ruang lingkupnya adalah pengembangan institusi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagiandari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan pertukaran staf, mahasiswa atau pengajar," tambah Direktur PPs UMA, Prof Retna A Kuswardani didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP

Direktur PPs UMA menjelaskan kesepakatan kerjasama itu berlangsung selama lima tahun sejak ditandatangani. "Adanya kerjasama ini diharapkan semakin meningkatkan kompetensi lulusan PPs Magister Ilmu Hukum UMA," ujar Prof Retna seraya menyebutkan PPs UMA juga telah menjalin berbagai kerjasama dengan universitas lainn.

Terkait fieldtrip, Prof Retno menyatakan sebagai studi banding bagi mahasiswa melihat realita praktik hukum dan aplikasinya di tengah masyarakat.

Dari dua lokasi kunjungan tersebut, mereka (KPK dan Undip red) sangat mengapresiasi tinggi dan berharap tahun-tahun mendatang tetap berlanjut. (twh)



PORTIBI

SELASA 3 FEBRUARI 2015

HALAMAN

3

FH UMA dan Peradi Gelar PKPA

MEDAN (Portibi DNP): Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mulai 31 Januari hingga 21 Februari 2015.

PKPA dibuka secara resmi Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, di convention hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (31/1). Hadir dalam acara pembukaan itu, Ketua DPN Peradi diwakili Harlen SinagSH, MH, Wakil Rektor III UMA Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA diwakili Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik Suhatrizal SH, MH, Ketua PKPA FH UMA Ridho Mubarak SH, MH dan unsur pengurus DPC Peradi Medan.

Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang dalam sambutannya, mengapresiasi inisiatif FH UMA yang menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPN Peradi dalam penyelenggaraan PKPA. Kerjasama ini, katanya, akan menjadi nilai tambah bagi UMA khususnya fakultas hukum PTS tersebut. "Kami berharap, PKPA bukan hanya satu angkatan, tetapi berkelanjutan agar alumni FH UMA menjadi pencetak advokat-advokat tangguh di tanah air," kata rektor.

Rektor meminta kepada panitia dan peserta agar sungguh-sungguh melaksanakan dan mengikuti PKPA. Sebab, dalam laporan Kopertis Wilayah I Sumut pada 2014, UMA adalah salah satu PTS sangat sehat di Sumut. "Status PTS sangat sehat itu, harus tercermin dari penye-

lenggaraan PKPA angkatan pertama ini," tandas Matondang. Dalam kesempatan itu, Ketua DPN Peradi diwakili Harlen Sinaga dalam sambutannya mengatakan, PKPA adalah salah satu syarat bagi calon advokat untuk mengikuti ujian yang dilaksanakan Peradi.

Dalam PKPA, katanya, peserta dimantapkan pemahamannya tentang Undang-Undang Keadvokatan, materi-materi standar hukum pidana, hukum perdata, tata usaha Negara dan lainnya.

"Peserta harus serius mengikuti PKPA. Karena, hanya 40 hingga 50 persen calon advokat dari seluruh Indonesia yang lulus pada ujian yang dilaksanakan Peradi. Bahkan, ada doktor (S3) yang harus sampai tiga kali mengikuti ujian calon advokat di Peradi. Ini bukan soal pintar atau tidak pinta, tapi adalah keseriusan dan harus fokus," kata Sinaga. Dekan FH UMA diwakili WD I Suhatrizal menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan DPN Peradi kepada FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA. Dia berharap, peserta serius mengikuti pendidikan khusus ini agar lulus 100 persen.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA angkatan I UMA ini diikuti 30 peserta terdiri dari alumni FH UMA dan lulusan perguruan tinggi lain di Sumut. Dia mengesankan, PKPA sesuai dengan UU Keadvokatan merupakan syarat mutlak menjadi advokat. Di penghujung acara pembukaan PKPA, Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang dan pimpinan DPN Peradi menandatangani MoU dalam penyelenggaraan PKPA. **PO9**



REALITAS

Jumat, 17 April 2015

9

Pengamat Pertanian UMA: Indonesia Seharusnya Malu Impor Pangan

Medan, Realitas

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait impor pangan mendapat tanggapan dari Pengamat Pertanian Universitas Medan Area (UMA) Ir Zulheri Noor MP. Pasalnya, saat ini impor pangan seperti beras, kedelai, jagung dan lainnya masih terjadi.

"Malu kita. Negara agraris kok malah impor pangan. Politik atau kebijakan pertanian Indonesia keliru. Salah urus. Dengan kondisi lahan yang luas, sumber daya alam yang memadai seharusnya tidak perlu impor. Cuma perlu dimodifikasi jumlah kebutuhan akan lahan pertanian itu," kata Zulheri ketika dihubungi di kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (9/4). Tanah yang subur, kata Zulheri, boleh-boleh saja dikonversikan, asalkan ada pemetaan untuk lahan menanam pangan, palawija, perkebunan dan lahan pemukiman. Itu harus betul-betul dihitung sesuai kebutuhan sehingga Indonesia tidak harus mengimpor hasil pertanian dari negara lain. Selain itu, pemerintah juga harus memproteksi (melindungi dan menjamin) harga pertanian agar tidak merosot jatuh. Pasalnya, kalau harga beras rendah sedangkan harga karet dan palawija lebih menguntungkan, maka petani tentu secara psikologis akan beralih ke komoditi, bukan pangan lagi.

Jadi, pemerintah harus mem-

buat regulasi atau peraturan yang mendorong agar petani boleh menanam komoditi yang sudah dipetakan lahannya. Setelah itu, perlu diproteksi dan dibina, bukan dibinasakan. "Saya melihat petani sepertinya besar dan tumbuh sendiri. Mandiri tanpa diproteksi dan dibina pemerintah," ucapnya.

Dia mencontohkan, akibat kelangkaan pupuk terkadang petani kebingungan mencari pupuk sendiri. Padahal kalau persoalan kelangkaan pupuk bisa diatasi, pertanian bisa berlimbas berkembang.

Wakil Rektor III UMA ini mengungkapkan kelangkaan kedelai yang pernah menerpa Indonesia juga akibat pertanian yang salah urus. Padahal, kedelai bisa dikembangkan di lahan Sumatera yang diketahui berlahan asam karena curah hujannya yang cukup tinggi. Diakuinya, lahan asam memang tidak cocok untuk ditanami kedelai. Namun dengan teknologi masalah itu bisa diatasi.

"Kedelai tidak bisa tumbuh di tanah asam yang bercurah hujan tinggi seperti di Sumatera ini. Tapi dengan teknologi melakukan pengapuran tanah, kedelai juga bisa ditanam di lahan Sumatera," ungkapnya. Jika beralasan harga kapur mahal sehingga sulit untuk melakukan penanaman kedelai, kata Zulheri, mengapa tidak dibuat pabrik kapur. "Cari investor. Sumber daya alam kita memadai. Jan-

gan setengah-setengah memban- gun pertanian yang juga bisa menyerap banyak tenaga kerja," tukasnya. Untuk itu, Indonesia membutuhkan orang yang ahli pertanian yang mampu mengurus persoalan pertanian. Lagipula, sepertiga masyarakat Indonesia bergantung hidupnya dari pertanian. "Tak ada alasan harga kapur mahal, harga pupuk mahal sehingga juga harus mengimpornya dan tidak mengupayakannya sendiri," katanya lagi.

Zulheri menyebutkan, sepanjang urat Pulau Sumatera terdapat kandungan mineral yang dapat diolah untuk hara atau sumber makanan pertanian untuk dibuat pupuk. Akademisi UMA ini mengaku prihatin masih terjadi impor pangan di Indonesia, padahal kalau pertanian di Indonesia didorong, diolah dan dikelola dengan baik tidak akan terjadi impor. Penyerapan tenaga kerja yang banyak juga bisa terjadi. Dia mempertanyakan di zaman Presiden Soeharto Indonesia bisa swasembada pangan, namun saat ini malah harus melakukan impor. Solusinya, kata Zulheri, perlu dihitung berapa kebutuhan lahan pertanian kita supaya tidak impor. Lahan pertanian tersebut harus betul-betul dijaga dan jangan sembarang dialihkan. Regulasi perlu dibuat agar petani tidak sembarangan mengubah lahannya. (r-ji)

WASPADA

WASPADA

Senin
27 April 2015

B2

Mahasiswa Pecinta Alam Tanam 2.000 Mangrove

LIMAPULUH (Waspada): Dalam memperingati hari bumi sedunia yang jatuh pada 22 April hari ini, sekelompok mahasiswa pecinta alam menggelar aksi penanaman pohon mangrove di pesisir pantai di Kab. Batubara.

Penanaman pohon mangrove oleh Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Gemar Alam Psikologi Universitas Medan Area (GASI UMA) ini, dilakukan di sekitar obyek wisata Pantai Bunga laut Indah (BALI) di Desa masjid Lama, Kec. Talawi, Batubara.

Kegiatan yang diberi nama mangrove in action tersebut dilakukan bertujuan untuk menghijaukan kembali pesisir pantai. Sedikitnya ada dua ribu pohon mangrove yang ditanam untuk menggantikan pohon mangrove yang telah rusak.

Batubara sendiri memiliki garis pantai sepanjang 62 kilometer. Namun, sebagian hutan mangrove yang ada di sepanjang pesisir pantai kini telah rusak akibat dijarah, maupun beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan permukiman.

Menurut Abdurrahman Tumangger, selaku Ketua Panitia penanaman pohon mangrove, kegiatan penanaman pohon mangrove tersebut sebagai upaya pelestarian alam dan kepedulian lingkungan di Kab. Batubara.

"Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Bumi. Selain itu, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi alam dan lingkungan. Sebab berdasarkan survei yang ada, kondisi hutan Mangrove di Kabupaten Batubara kondisinya dinilai cukup memprihatinkan.

Suriyanto, Sekretaris LSM Kumpulan Anak-anak Pesisir Laut (KAIL) Batubara mengaku sangat mendukung dan menilai positif kegiatan penanaman mangrove tersebut. "Hari ini pohon mangrove yang ditanami oleh mahasiswa ini sekitar 2.000 pohon. Kami sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini, sebab untuk diketahui bahwa saat ini kondisi hutan mangrove di Batubara kondisinya cukup memprihatinkan," ungkapnya. (c05)

WASPADA

Tim Peneliti UMA Hasilkan Pisang Roti Raksasa

MEDAN (Waspada): Tim peneliti Universitas Medan Area (UMA) berhasil mengembangkan tanaman pisang unggul. Dengan teknik kultur jaringan tumbuhan, buah pisang roti menjadi sangat besar.

"Bentuk, warna dan rasa pisang roti unggul ini sama dengan pisang biasa. Namun, yang membedakannya adalah ukuran dan beratnya," kata Ketua tim Peneliti tanama pisang UMA, Dr Ir Suswati, MP kepada *Waspada*, Selasa (10/2) di kampus UMA.

Bahkan, sebutnya, berat perbuah pisang unggul itu mencapai 300-400 gram.



Waspada/Muhammad Ferdinan Sembiring

KETUA tim Peneliti tanama pisang UMA, Dr Ir Suswati, MP (kanan) didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawatu, MP, saat memperlihatkan pisang roti unggul di kampus UMA, Selasa (10/2).

Lanjut ke hal A2 kol. 7

Tim Peneliti UMA Hasilkan ...

Satu tandan pisang unggul bisa mencapai 20-30 Kg dengan masa panen sembilan bulan, mulai dari proses pembibitan. Tinggi pohon bisa mencapai 2,5-3 meter dan dalam satu tandan pisang terdapat lima sisir.

Didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawatu, MP, Suswati mengatakan, tujuan utama dari teknik kultur jaringan ini untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu relatif singkat, dan hasil bibit dari kultur jaringan ini mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya.

"Pisang unggul ini akan dikembangkan di sejumlah daerah yakni, di Kab. Asahan, Deliserdang, Serdang Bedagai (Sergai), dan Simalungun. Saat ini, sudah dilakukan di kawasan Medan Tuntungan," sebutnya.

Dijelaskan, keuntungan lain dalam membudidayakan pisang dengan teknik kultur jaringan, kecepatan tumbuh bibit merata/seragam dan saat berbuahnya lebih cepat dan waktu panen serempak serta kemasan buah seragam, sehingga lebih efisien dalam penanganannya.

Selain itu masa panen pisang hasil pengembangan dengan teknik tersebut berbeda dengan pisang biasa. Di mana ketika masa panen, daun pisang masih tersisa dengan kondisi bagus (hijau).

Jenis pisang ini bisa diolah untuk keripik, panceg dan tepung. Tim peneliti juga menggunakan pupuk semi organik dan anorganik," katanya dan menambahkan, pisang tersebut tahan terhadap cuaca ekstrem. Juga ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit.

HARIAN Analisa

17 Februari 2015

Halaman 9



Analisa/taufik wal hidayat

PISANG UNGGUL: Ketua tim Peneliti Tanaman Pisang MP, Suswati, MP (kanan) didampingi Kabag Humas MP, Ir Asmah Indrawati MP memaparkan hasil pisang unggul UMA, Selasa (10/2) di

UMA Kembangkan Pisang Unggul dengan Teknik Kultur Jaringan

Peneliti Universitas Medan Area (UMA) berhasil mengembangkan tanaman pisang unggul dengan teknik kultur jaringan, buah pisang roti menjadi sangat manis dan warna dan rasa pisang roti unggul ini sama dengan pisang biasa. Namun, yang membedakannya adalah umur panennya. Kata Ketua tim Peneliti Tanama Pisang MP, Suswati, MP kepada wartawan Selasa (10/2) di

berat perbuah pisang unggul tersebut 300-400 gram. Satu tandan pisang unggul 20-30 Kg.

panen pisang roti unggul ini sembilan bulan, tinggi pohon pisang bisa 2,5-3 meter. Dalam satu tandan pisang

Didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati, MP, Suswati mengatakan, tujuan utama dari teknik kultur jaringan ini adalah untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak di dalam waktu relatif singkat, dan hasil bibit dari kultur jaringan ini mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya.

"Pisang unggul ini akan dikembangkan di sejumlah daerah yakni, di Kabuoaten. Asahan, Deliserdang, Serdang Bedagai (Sergai), dan Simalungun. Saat ini, sudah dilakukan di kawasan Medan Tuntungan," sebutnya.

Dijelaskan, keuntungan lain dalam membudidayakan pisang dengan teknik kultur jaringan, kecepatan tumbuh bibit merata/seragam dan saat berbuahnya lebih cepat.

Panen

Kemudian, lanjut dia, waktu panen serempak dan kemasakan buah seragam, sehingga lebih efisien dalam penanganannya.

Selain itu masa panen pisang hasil pengembangan dengan teknik kultur jaringan berbeda dengan pisang biasa. Di mana ketika masa panen, daun pisang masih tersisa dengan kondisi bagus (hijau).

Prosepek pisang roti ini, sebutnya, sangat cerah. Jenis pisang ini bisa diolah untuk keripik, pancage dan tepung roti. "Penanaman pisang roti menggunakan pupuk semi organik dan anorganik," terangnya.

Lebih jauh, sebutnya, pisang roti hasil penelitian ini tahan terhadap cuaca ekstrem. "Segala cuaca dihadapi, tapi, terbukti pisang super berhasil dipanen dengan baik. Meskipun kondisi cuaca berubah-ubah," jelasnya.

Begitu juga, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, pisang unggul ini sangat kuat. "Kondisi itu memberikan keuntungan bagi petani yang mengembangkan pisang roti unggul ini. Di mana dapat mengurangi ongkos produksi," katanya.

Dia mengatakan, kemungkinan yang hama yang menyerang pisang, adalah hama penggereng pokok dan hama penggereng batang. Mengantisipasinya petani akan dibekali pendidikan khusus.

Katanya, pisang roti unggul ini bisa pengganti pisang kepok sebagai bahan baku tepung. Prosepek pisang roti sangat cerah, namun, pihaknya terburut terhadap pemasaran. Diharapkan, dinas terkait ikut terlibat mencari pemasaran pisang dengan teknik kultur jaringan.

"Target ke depannya, UMA akan fokus dengan limbah pisang. Air pisang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Caranya batang pisang yang dipilah-pilah. Kita terburut dengan anggaran untuk mengadakan alatnya seperti penggiling/peras tebu. kami sudah belajar ke Yogyakarta di CV Indo Ceagras untuk pengolahan limbah tersebut," ungkap Suswati. (twh)

Gunakan Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan

UMA Kembangkan Pisang Roti Raksasa

Medan, Realitas

Universitas Medan Area (UMA) mengembangkan tanaman pisang dengan teknik kultur jaringan tumbuhan. Pengembangan tersebut dilakukan bekerjasama dengan perusahaan swasta di Kisaran, Kabupaten Asahan dengan uji multikasi di Deliserdang, Serdang Bedagai (Sergai), dan Simalungun.

"Tujuan utama dari teknik kultur jaringan adalah untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak di dalam waktu yang relative singkat, dan hasil bibit dari kultur jaringan ini mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya," kata Peneliti Tanaman Pisang -UMA Dr Ir Suswati MP didampingi Humas UMA Ir Asmah

Indrawati MP, Selasa (10/2) di Kampus UMA Jalan Kolang, Medan Estate. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UMA itu menjelaskan, pisang roti pengganti pisang kepok sebagai bahan baku tepung, beratnya bisa mencapai 300-400 gram per buah. Tinggi pohon mencapai 2,5 - 3 meter. Sedangkan berat satu tandan pisang

ang mencapai 20-30 kg (5 sisir dalam satu tandan).

Dijelaskan, keuntungan dalam membudidayakan pisang dengan teknik kultur jaringan, bibit dapat diperoleh dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat.

Sifat individu baru sama dengan induknya, kecepatan tumbuh bibit merata/seragam dan saat berbuahnya lebih cepat. Contohnya untuk tanaman pisang berkisar 9-12 bulan. Kemudian, lanjut dia, waktu panen serempak dan kemasakan buah seragam, sehingga lebih efisien dalam penanganannya. "Kesehatan bibit lebih terjamin. Prospek pisang roti sangat cerah. Namun terbentuk dengan pemasaran. Diharapkan, dinas terkait ikut terlibat mencari pemasaran pisang dengan teknik kultur jaringan. Jenis pisang ini bisa dibuat untuk keripik, panceg dan tepung roti," ungkapnya.

Dikatakan, dalam masa panen, pisang dengan teknik kultur jaringan berbeda dengan pisang biasa. Pisang dengan teknik kultur jaringan pada masa panen, tujuh daun masih tersisa dengan kondisi bagus (hijau). "Bibit bisa diperoleh dengan harga Rp 10



Peneliti Tanaman Pisang -UMA Dr Ir Suswati MP didampingi Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP, Selasa (10/2) di Kampus UMA Jalan Kolang, Medan Estate. Memperlihatkan jenis pisang roti yang menggunakan Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan. Sehingga ukurannya melebihi batas normal pisang biasa.

ribu. Untuk penanamannya menggunakan pupuk semi organik (jerami padi di komposkan)," terangnya.

Dalam budidaya pisang dengan teknik kultur jaringan, ditemukan hama pengereng batang dan hama pengereng batang. Untuk mengantisipasi agar hama tidak merusak tanaman, lanjut dia, petani dibekali khusus dalam penanganan hama pisang roti. "Target kedepannya, UMA akan fokus dengan limbah pisang. Air batang pisang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Caranya batang pisang yang dipilah-pilah. Kita terburut dengan anggaran untuk mengadakan alatnya seperti penggiling/peras tebu. Kami sudah belajar ke Yogyakarta di CV Indo Ceagras untuk pengolahan limbah tersebut," paparnya. (r-jl)

baru sama dengan induknya, kecepatan tumbuh bibit merata/seragam dan saat berbuahnya lebih cepat, contohnya untuk tanaman pisang berkisar 9-12 bulan.

Kemudian, lanjut dia, waktu panen serempak dan kemasakan buah seragam, sehingga lebih efisien dalam penanganannya.

"Kesehatan bibit lebih terjamin. Prosepek pisang roti sangat cerah. Namun terbentuk dengan pemasaran. Diharapkan, dinas terkait ikut terlibat mencari pemasaran pisang dengan teknik kultur jaringan. Jenis pisang ini bisa dibuat untuk keripik, panceg dan tepung roti," ungkapnya.

Dikatakan, dalam masa panen, pisang dengan teknik kultur jaringan berbeda dengan pisang biasa. Pisang dengan teknik kultur jaringan pada masa panen, tujuh daun masih tersisa dengan kondisi bagus (hijau). "Bibit bisa diperoleh dengan harga Rp 10 ribu per tandan. Untuk penanamannya menggunakan pupuk semi organik (jerami padi di komposkan)," terangnya.

Dalam budidaya pisang dengan teknik kultur jaringan, ditemukan hama pengereng pokok dan hama pengereng batang. Untuk mengantisipasi agar hama tidak merusak tanaman, lanjut dia, petani dibekali khusus dalam penanganan hama pisang roti.

"Target ke depannya, UMA akan fokus dengan limbah pisang. Air pisang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Caranya batang pisang yang dipilah-pilah. Kita terbentuk dengan anggaran untuk mengadakan alatnya seperti penggiling/peras tebu.

Kami sudah belajar ke Yogyakarta di CV Indo Ceagras untuk pengolahan limbah tersebut," papar dosen Fakultas Pertanian UMA ini. (HAM)



andalas | hamdan

Peneliti UMA Dr Ir Suswati MP dan Ir Asmah Indrawati MP menunjukkan pisang roti yang dihasilkan lewat teknik kultur jaringan tumbuhan, Selasa (10/2) di Kampus UMA Jalan Kolam, Medan Estate.

morfologi sama persis dengan tanaman induknya," kata Peneliti Tanaman Pisang UMA Dr Ir Suswati MP didampingi peneliti Ir Asmah Indrawati MP, Selasa (10/2) di Kampus UMA Jalan Kolam, Medan Estate.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UMA itu menjelaskan, pisang roti pengganti pisang kepok sebagai bahan baku tepung, beratnya bisa mencapai 300-400 gram per buah. Tinggi pohon mencapai 2,5-3 meter. Sedangkan berat satu tandan pisang mencapai 20-30 kg (5 sisir dalam satu tandan). Dijelaskan, keuntungan dalam membudidayakan pisang dengan teknik kultur jaringan, bibit dapat diperoleh dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, sifat individu

meliti
Mt:
sang
ti
prospek
ran

Inggu, 15 Februari
ing, anak perusahaan
onp di Malaysia,
Air membuka
Rencana KJada Namu-
Rencananya rute ini
layani empat kali
u dengan pesawat ATR
berkapasitas 72 kursi.

atas Medan Area (UMA)
gkan tanaman pisang roti
ik kultur jaringan
pengembangan tersebut
kerjasama dengan
swasta di Kisaran,
asaban dengan uji
li Deli Serdang, Serdang
'gai), dan Simalungun.
tama dari teknik kultur
ah untuk mendapatkan
u dalam jumlah banyak di
yang relatif singkat, dan
ri kultur jaringan ini.
sifat fisiologi dan

Teknik Kultur Jaringan

■ zahendra

MedanBisnis - Medan
Universitas Medan Area
(UMA) mengembangkan
bibit/tanaman pisang
dengan teknik kultur
jaringan tumbuhan.
Pengembangan tersebut
dilakukan bekerja sama
dengan perusahaan
swasta di Kisaran, Kabu-
paten Asahan dengan uji
multilokasi di Deli-
serdang, Serdang Bedagai
(Sergai), dan Simalungun.

"Tujuan kultur jaringan ini untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat serta memiliki sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya," kata Peneliti Tanaman Pisang UMA Dr Suswati didampingi Humas UMA Asmah Indrawati, Selasa (10/2)

di Kampus UMA Jalan Kolam, Medan Estate.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UMA itu menjelaskan, pisang roti pengganti pisang kepok sebagai bahan baku tepung, beratnya bisa mencapai 300-400 gram per buah. Tinggi pohon mencapai 2,5 - 3 meter. Sedangkan berat satu tandan pisang mencapai 20-30 kg (5 sisir dalam satu tandan).

Dijelaskan, keuntungan dalam membudidayakan pisang dengan teknik kultur jaringan, bibit dapat diperoleh dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, sifat individu baru sama dengan induknya, kecepatan tumbuh bibit merata/seragam dan saat berbuahnya lebih cepat. Contohnya untuk tanaman pisang berkisar 9-12 bulan.

Kemudian, lanjut dia, waktu panen serempak dan kemasakan buah seragam, sehingga lebih efisien dalam penanganannya.

"Kesehatan bibit lebih terjaga. Prospek pisang roti sangat cerah.

Namun terbentur dengan pemasaran. Diharapkan, dinas terkait ikut terlibat mencari pemasaran pisang dengan teknik kultur jaringan. Jenis pisang ini bisa dibuat untuk keripik, pancake dan tepung roti," ungkapnya.

Dikatakan, dalam masa panen, pisang dengan teknik kultur jaringan berbeda dengan pisang biasa. Pisang dengan teknik kultur jaringan pada masa panen, tujuh daun masih tersisa dengan

kondisi bagus (hijau). "Bibit bisa diperoleh dengan harga Rp 10 ribu. Untuk penanamannya menggunakan pupuk semi organik (jerami padi di komposkan)," terangnya.

Dalam budidaya pisang dengan teknik kultur jaringan, ditemukan hama penggereng pokok dan hama penggereng batang. Untuk mengantisipasi agar hama tidak merusak tanaman, lanjut dia, petani dibe-

kali khusus dalam penanganan hama pisang roti.

"Target ke depannya, UMA akan fokus dengan limbah pisang. Air pisang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Namun, sejauh ini kita terbentur anggaran untuk mengadakan alatnya seperti penggiling/peras tebu. Kami sudah belajar ke Yogyakarta di CV Indo Ceagras untuk pengolahan limbah tersebut," paparnya. ●



■ medanbisnis/zahendra

HASIL PENELITIAN

Peneliti tanaman pisang Universitas Medan Area (UMA) Dr Ir Suswati MP (kanan) didampingi Humas Ir Asmah Indrawati MP memaparkan hasil panen pisang roti dari hasil penelitian teknik kultur jaringan di

WASPADA

WASPADA
Jumat
20 Februari 2015

A6

Hadapi MEA 2015, UMSU-UMA Tekan MoU

MEDAN (Waspada): "Kerjasama bisa melengkapi perkembangan dan kemajuan terhadap kualitas pendidikan. Sebab perkembangan global sudah menjadi suatu keharusan untuk saling melengkapi guna mencapai keunggulan".

Demikian disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU, Dr Agusani, MAP usai menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Rektor Universitas Medan Area (UMA), Prof Dr H A Ya Kub Matondang MA, Jumat (13/2) di kampus UMA Jln Kolam Medan Estate. Hadir pejabat tinggi masing-masing universitas.

Sebagaimana telah diketahui, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis di tengah tengah masyarakatnya. Peran strategis tersebut sering dirumuskan

kan kedalam tiga wacana besar, yaitu universitas pengajaran (*teaching universities*), universitas riset (*research universities*) dan benteng peradaban (*bastion of civilization*).

Lebih lanjut, kata Agusani, globalisasi tidak bisa ditawarkan dalam memasuki MEA 2015. "Semua perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta akan menghadapi persaingan global ini," sebutnya.

Menurutnya, bukan waktunya lagi perguruan tinggi dalam negeri saling bersaing baik antara PTS dengan PTN maupun antar PTS sendiri. "Paling penting saat ini adalah menciptakan kerjasama yang harmonis untuk melawan invansi SDM atau kekuatan dari luar," bebarnya.

Bukan saatnya sekarang bicara saya paling hebat. Namun,

bagaimana kita bisa melahirkan generasi berdaya saing menghadapi MEA 2015." Menghadapi MEA 2015, sudah saatnya perguruan tinggi memanfaatkan potensi tiap perguruan tinggi dengan baik untuk meningkatkan kualitas bersama-sama," tegasnya.

Menjawab tantangan global sangat sulit bagi perguruan tinggi melawan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak membangun networking. Disisi lain pemerintah dalam membuat kebijakan sudah tidak boleh lagi ada diskriminasi untuk PTN dan PTS.

"Sebab sebagaimana PTS memiliki kontribusi yang besar untuk ikut mencetak sarjana yang bisa membangun bangsa," kata Agusani. Oleh karena itu, Agusani mengaku, sangat mengapresiasi kerjasama tersebut.

Apalagi, tambahnya, kerjasama UMSU tidak bisa dilepaskan dengan pendiri UMA yakni almarhum H Agus Salim Siregar. "UMA dan UMSU punya benang merah yang tidak bisa dilupakan, tegasnya

Kerjasama UMSU dengan UMA, merupakan pertemuan yang sangat luar biasa dalam membangun kekuatan dan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

"Kerjasama ini juga salah satu syarat standar untuk borang akreditasi. UMA Tri Dharma Perguruan Tinggi dan UMSU punya ciri khas catur dharma dan ke-muhammadiyah, ujar Rektor UMSU. Ditambahkannya, kerjasama UMA dan UMSU ini akan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sementara itu, Rektor UMA

Prof Matondang mengatakan sudah menjadi keharusan untuk saling melengkapi untuk kemajuan bersama, dalam hal ini implementasi dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Sharing aset dan sumber daya manusia akan banyak mendukung perkembangan akademik dan ilmu pengetahuan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Tindak lanjut dari kerjasama UMA dan UMSU ini secara ril akan dilakukan oleh setiap unit dari masing-masing universitas," jelas Prof Matondang seraya menyebutkan baru-baru ini di bidang dakwah UMA telah mendatangkan kerjasama diantaranya dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Al Was- liyah. (m49)

UMA dan UMSU Tandatangani MoU

Realitas

...sama bisa melengkapi perkembangan dan an terhadap kualitas pendidikan. Sebab bangan global sudah menjadi suatu ke- n untuk saling melengkapi guna mencapai ulan.

...r Universitas Medan (UMA), Prof Dr H A Matondang MA melakukan hal itu, Jumat malam sambutannya andatangi kesepaka- sama dengan Univer- hamadiyah Sumat- a (UMSU).

...pakatan kerjasama ma tahun itu, ditan- i Rektor UMA dan MSU, Dr Agus Sani aksikan para pejabat universitas tersebut di UMA Jalan Kolan- state.

...lanjut, Ptof Maton- gatakan sudah men- urusan untuk saling api untuk kemajuan dalam hal ini imple- ri pengembangan Tri

...Dharma Perguruan Tinggi. "Sharing aset dan sumber daya manusia akan banyak mendukung perkembangan akademik dan ilmu penge- tahun sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mas- yarakat. Tindak lanjut dari kerjasama UMA dan UMSU ini secara ril akan dilakukan oleh setiap unit dari masing- masing universitas," jelas Prof Matondang seraya men- yebutkan baru - baru ini di bidang dakwah UMA telah menandatangani kerjasama di antaranya dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Al Wasliyah.

...Benang Merah Rektor UMSU, Dr Agus Sani MAP mengungkapkan perkembangan dan kemajuan

...UMSU tidak bisa dilepaskan dengan pendiri UMA yakni almarhum H. Agus Salim Siregar "UMA dan UMSU punya benang merah yang tidak bisa dipisahkan dan di- lupakan. Karena keberadaan UMSU tidak bisa dilepaskan dari pendiri UMA, Bapak H Agus Salim," ungkap Dr Agus Sani.

...Alumni Magister Admin- istrasi Publik (MAP) PPs UMA ini menyambut baik kerjasama UMSU dengan UMA, dan pertemuan untuk saling kerjasama kedua uni- versitas ini, merupakan per- temuan yang sangat luar bi- asa dalam membangun kekua- tan dan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya Su- matera Utara.

...Kerjasama ini juga salah satu syarat standar untuk bo- rang akreditasi. UMA Tri Dharma Perguruan Tinggi dan UMSU punya ciri khas catur dharma dan kemuh- madiyah, ujar Rektor UM- SU seraya mengungkapkan



Rektor Universitas Medan Area (UMA), Prof Dr H A Ya Kub Matondang MA, didampingi Wakil Rektor III Ir. Zulheri Noer MP dan Rektor UMSU, Dr Agus Sani MAP menandatangani MoU yang disaksikan para pejabat kedua universitas tersebut di kampus UMA Jalan Kolan Medan Estate.

...UMSU akan membangun ka- mpus terpadu di areal seluas 40 hektare. Ditambahkannya, kerjasa- nan Wilayah Muhamma- ma UMA dan UMSU ini akan diyah. disampaikan kepada Pimpi- (r-ji)

HARIAN andalas

Sabtu

14 Februari 2015

Hal. **14**

UMA-UMSU Jalin Kerja Sama

Medan-andalas

Kerja sama bisa melengkapi perkembangan dan kemajuan terhadap kualitas pendidikan. Sebab perkembangan global sudah menjadi suatu kebutuhan untuk saling melengkapi dan mencapai keunggulan.

Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Dr HA Ya'Kub Matondang MA mengemukakan hal itu, Jumat (13/2) dalam sambutannya usai menandatangani kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Kesepakatan kerja sama selama lima tahun ini ditandatangani Rektor UMA Prof HA Ya'Kub Matondang dan Rektor UMSU Dr Agussani MAP, disaksikan para pejabat kedua universitas tersebut di kampus I UMSU Jalan Kiriati, Medan Estate.

Lain lanjut, Prof Matondang mengatakan sudah menjadi keha-

rusan saling melengkapi untuk kemajuan bersama, dalam hal ini implementasi dari pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

"Sharing aset dan sumber daya manusia akan banyak mendukung perkembangan akademik dan ilmu pengetahuan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tindak lanjut dari kerja sama UMA dan UMSU ini secara riil akan dilakukan oleh setiap unit dari masing-masing universitas," jelas Prof Matondang seraya menyebutkan baru-baru ini di bidang dakwah UMA telah menandatangani kerja sama diantaranya dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Al Washliyah.

Rektor UMSU Agussani mengungkapkan, perkembangan dan kemajuan UMSU tidak bisa dilepaskan dengan pendiri UMA yakni almarhum H Agus Salim Siregar. "UMA dan UMSU punya benang

merah yang tidak bisa dipisahkan dan dilupakan. Karena keberadaan UMSU tidak bisa dilepaskan dari pendiri UMA, Bapak H Agus Salim," ungkap Agussani.

Alumnus Magister Administrasi Publik (MAP) PPs UMA ini menyambut baik kerja sama UMSU dengan UMA dan pertemuan untuk saling kerja sama kedua universitas ini, merupakan pertemuan yang sangat luar biasa dalam membangun kekuatan dan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

"Kerja sama ini juga salah satu syarat standar untuk borang akreditasi," ujar Rektor UMSU seraya mengungkapkan UMSU akan membangun kampus terpadu di areal seluas 40 hektare.

Ditambahkannya, kerja sama UMA dan UMSU ini akan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut. (HAM)

Medan **Bisnis**

IV

Sabtu, 14 Februari 2015

UMA-UMSU Tandatangani MoU Kembangkan Kualitas Pendidikan

■ zahendra

MedanBisnis—Medan

Kerja sama bisa melengkapi perkembangan dan kemajuan terhadap kualitas pendidikan. Sebab perkembangan global sudah menjadi suatu keharusan untuk saling melengkapi guna mencapai keunggulan.

Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Dr H A Ya'Kub Matondang MA mengemukakan hal itu, Jumat (13/2), dalam sambutan usai menandatangani kesepakatan kerjasama dengan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Kesepakatan kerjasama selama lima tahun itu, ditandatangani Rektor UMA dan Rektor UMSU Dr Agus Sani MAP disaksikan para pejabat kedua universitas tersebut di kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate.

Prof Ya'kub Matondang mengatakan, sudah menjadi keharusan untuk saling melengkapi untuk kemajuan bersama, dalam hal ini implementasi dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Sharing aset dan

sumber daya manusia akan banyak mendukung perkembangan akademik dan ilmu pengetahuan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tindak lanjut dari kerjasama UMA dan UMSU ini secara nyata akan dilakukan oleh setiap unit dari masing-masing universitas," jelas Matondang seraya menyebutkan baru-baru ini di bidang dakwah UMA telah menandatangani kerjasama di antaranya dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Al Wasliyah. ●

HARIAN Sumut 24



Sumut 24 **3** SELASA 17 FEBRUARI 2015 Metropolis

UMA Jali MoU Dengan UMSU Terkait Tri Dharma PT

MEDAN | SUMUT24

Universitas Medan Area (UMA) menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk perkembangan dan kemajuan terhadap kualitas pendidikan keduanya, kemarin di kampus UMA.

Rektor UMA, Prof Dr H A Ya'Kub Matondang MA dalam sambutannya usai menandatangani kesepakatan kerjasama mengatakan sudah menjadi keharusan kedua universitas untuk saling melengkapi untuk kemajuan bersama, dalam hal ini implementasi dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Sharing aset dan sumber daya manusia akan banyak mendukung perkembangan akademik dan ilmu pengetahuan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tindak lanjut dari kerjasama UMA dan UMSU ini secara nyata akan dilakukan setiap unit kerja dari masing-masing universitas," jelas Prof Matondang yang didampingi Rektor UMSU Agussani.

Prof. Matondang juga menyebutkan UMA juga menjalin kerjasama serupa beberapa waktu lalu dalam hal dakwah dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Al-Wasliyah.

Sementara itu Rektor UMSU, Dr Agus Sani MAP mengungkapkan perkembangan dan kemajuan UMSU tidak bisa lepas dari sejarah peran dan dedikasi pendiri UMA yakni almarhum H. Agus Salim Siregar yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah.

"UMA dan UMSU punya benang merah yang tidak bisa dipisahkan dan dilupakan. Karena keberadaan UMSU tidak bisa dilepaskan dari pendiri UMA, Bapak H Agus Salim," ungkap Dr Agus Sani.

Alumni Magister Administrasi Publik (MAP) PPs UMA ini menyambut baik kerjasama UMSU dengan UMA, dan menyebut pertemuan kedua universitas ini sebagai pertemuan yang sangat luar biasa dalam membangun kekuatan dan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara. "Kerjasama ini juga salah satu syarat standar untuk borang akreditasi UMA dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi dan UMSU dengan ciri khas catur dharma dan kemuhammadiyahannya," sebut Agussani. org

maknai Pesan Wapres da Hari Pers Nasional di Batam

Oleh: Drs. Indra Muda Hutahut, MAP

Pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Batam, Senin tanggal 9 Februari 2015 silam, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak pers dapat bertindak sebagai pemersatu dan mendamaikan bangsa yang disampaikan Wapres ini sangat beralasan karena, "pers merupakan telinga dan mulut sebuah bangsa. Jika bangsa tak memiliki telinga dan tak memiliki mulut, tentu bangsa tersebut akan kehilangan perhatian dari masyarakat luas. Pada 10 Februari 2015, hal ini menunjukkan, peranan pers sangat penting untuk menciptakan stabilitas nasional dan sebaliknya merusak stabilitas nasional menjadi penghubung informasi antara pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pers memiliki 2 pengertian yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, media cetak yang mencakup koran, majalah, tabloid, dan surat kabar termasuk pers. Sedangkan dalam pengertian luas Pers mencakup semua media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media internet, dan lain-lain.

Sejak pemerintahan Orde Baru (1965-1998), kebebasan pers lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Penyebabnya adalah pers di seluruh pelosok tanah air mulai berkembang. Namun, pemberitaan pers sering berada di bawah tekanan pemerintah yang ketat. Pemerintah Orde Baru membatasi kebebasan pers, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1984 tentang Undang-Undang Penerbitan Pers yang dalam praktiknya menjadi hambatan untuk mengontrol isi redaksi pers. Dengan situasi yang berkembang ketika itu, berita pers semakin banyak dan media elektronik mulai berkembang. Hal ini menunjukkan kepada kepentingan pers dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam rangka pembangunan nasional.

Sejak awal, Presiden RI Soekarno telah menempatkan pers sebagai mitra pemerintah. Hal ini menunjukkan kepada kepentingan pers dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam rangka pembangunan nasional.

Pada pengertian yang kedua ini, cakupan dan jangkauan Pers jauh lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan pengertian yang pertama. Informasi dapat diperoleh pemirsanya melalui layar Televisi, siaran radio, internet dan sejenisnya.

Sebagai telinga, mata, dan mulut pemerintah, pers memiliki fungsi dan peranan yang strategis. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU Pers ditegaskan, pers nasional melaksanakan peranan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan yang melekat pada pers, maka lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat dari azas demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga

yang disampaikan awak pers kepada masyarakat seperti lebih banyak memuat publikasi berupa kritikan dan hal-hal yang bernilai negatif atas kinerja pemerintah atau aparat pemerintah dibandingkan dengan kebhinekaannya. Tidak berimbang ini publikasi terhadap kebaikan dan keburukan kinerja pemerintah atau aparat pemerintah, menyebabkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada pada level yang buruk sehingga menjadi salah satu pemicu munculnya sikap apatis masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah, termasuk masalah KKN.

Pada sisi lain, pertarungan dan persaingan antar pemilik media, baik media massa maupun media elektronik menyebabkan masyarakat ikut terseret pada arus konflik tersebut. Hal ini disebabkan, beberapa pemilik media di Indonesia turut terjun dalam kancah politik, baik di tingkat daerah maupun pada tingkat nasional. Dengan kepentingan politik yang melekat pada pemilik penerbitan pers tersebut, publikasi yang sering dimuat pada media pers-nya cenderung lebih banyak

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi dan peranan pers yang demikian tentunya akan dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Oleh karena itu, kebebasan pers menjadi syarat yang mutlak agar pers dapat melaksanakan peranannya secara optimal.

Pers Nasional dalam Realita

Sepanjang usia Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan pers nasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 termen waktu yaitu, masa pemerintahan Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru dan era Reformasi. Pengelompokan ini tentu sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia ketika itu. Pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1965), peranan pers belum begitu menonjol, sebab publikasi pers masih terfokus dalam bentuk media massa berupa surat kabar dengan jangkauan peliputan berita yang masih terbatas, sedangkan majalah atau tabloid masih sangat langka dibandingkan dengan kondisi saat ini. Lapisan masyarakat yang memiliki kesempatan membaca media massa-pun masih terbatas yaitu, dari kalangan pejabat, birokrat, pengusaha, atau sering disebut golongan masyarakat pada level ekonomi menengah ke atas.

Rakyat Indonesia dipertontonkan dengan perseteruan dua kubu pemilik Stasiun televisi negeri ini. Prabowo-Hatta yang diusung Koalisi Merah Putih kerap mendapat pencitraan oleh TV One dan ANTV, sedangkan Jokowi-JK sering mendapat pencitraan dari Metro TV. Metro TV yang notabene adalah milik Surya paloh berada pada Koalisi Indonesia Hebat dan TVOne/ANTV miliknya ARB berada pada Koalisi Merah Putih disinyalir menjadi sutradara pada perseteruan tersebut. Konon, perseteruan ini hingga berlanjut pada penentuan pemenang Pilpres. Masing-masing kubu mengklaim menjadi pemenang Pilpres berdasarkan hasil perhitungan cepat sesuai data-data yang dipercayainya paling pantas dipercaya. Dari perseteruan ini, akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang hampir saja memicu perpecahan bangsa, terutama para pendukung kedua kubu yang bertikai.

Belajar dari perjalanan sejarah pers nasional, melalui peringatan acara puncak HPN di Batam, harapan Wapres Jusuf Kalla dan tentunya seluruh rakyat Indonesia, sangat menginginkan agar dimasa mendatang, Pers Nasiona

Pembiaran Konflik Di Tanah Garapan

Oleh: Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Pada sejumlah lahan bekas HGU maupun yang masih HGU PTPN 2, masih memiliki potensi menjadi objek rebutan di Sumatera Utara. Sikap pemerintah untuk meredakan konflik dapat dikatakan masih setengah hati dan terkesan melakukan pembiaran. Langkah yang ditempuh pemerintah melalui institusi Polri umumnya sebatas mencegah perkelahian di lokasi tanah garapan

Tanah garapan adalah tanah milik negara, namun untuk pemanfaatan dan penggunaannya sebagian diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Perencanaan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (SK Kepala BPN) disebutkan bahwa, "Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau sedang dikelola dengan sesuatu hak yang diberikan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu".

Dengan demikian, tanah garapan yang sudah dikelola sesuatu hak, dan sesuatu hak tersebut adalah hak milik, maka tidak bisa didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap. Karena sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) UUPA hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Kemudian hak milik tanah tersebut sudah dimiliki negara sesuai dengan pasal 27 UUPA. Kemudian jika hak tersebut merupakan Hak Guna Usaha maka Hak Guna Bangunan juga tidak bisa diadukan menjadi hak milik oleh penggarap kecuali hak guna usahanya telah habis sesuai dengan pasal 34 UUPA atau hak guna bangunannya sudah habis sesuai dengan pasal 40 UUPA.

Pada tahun 2002 melalui SK BPN Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/ 2002 pemerintah pusat mengeluarkan izin luas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Luas lahan sebesar 3.366,55 ha berada di Kabupaten Deli Serdang, 1.211,868 ha berada di Kabupaten Langkat dan 238,52 ha berada di Kabupaten Humbang. Sementara sebanyak 1.894,668 ha masih menunggu putusan dari BPN pusat. Menurut Gubernur Sumatera Utara, HGU PTPN II yang telah diberikan untuk Rencana

Umum Tata Ruang Wilayah Kabupten dan Kota (RUTRWK). Sementara sisanya, untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memiliki alas hak yang sah, untuk garapan rakyat, untuk masyarakat adat, serta untuk perumahan pensiunan karyawan perkebunan.

Dikeluarkannya tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II pada kenyataannya bukan menjadi tonggak baru penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan PTPN II, justru sebaliknya menjadi awal perluasan konflik. Pemerintah pusat hanya menyebutkan luasan tanah yang dikeluarkan dan jumlah lahan di masing-masing daerah tanpa menyebut lokasi (desa, kecamatan, apalagi potok-potok tanah yang memudahkan identifikasi keberadaan tanah). Situasi ini memberikan peluang kepada spekulasi tanah untuk turut andil dalam perebutan tanah eks HGU PTPN, bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Deli Serdang tanah-tanah yang diduga eks HGU PTPN II telah berubah menjadi hak milik pengusaha tertentu yang kemudian menyulap tanah-tanah itu menjadi perumahan mewah, perkebunan dan pusat pertokoan.

Potensi Konflik di Tanah garapan

Kendati aturan hukum yang mengatur penggunaan tanah garapan sudah ditetapkan sedemikian rupa, realitas yang terjadi di lapangan masih jauh berbeda. Perebutan lahan garapan menjadi kasus yang sering terjadi tanpa memperdulikan status tanah tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang status tanah garapan, menyebabkan mereka mudah tergoda untuk membelinya walaupun dengan surat-surat yang tidak lengkap karena ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Dalam beberapa kasus ditemukan jual beli lahan tanpa didukung surat-surat kepemilikan yang sah. Beberapa kali berpindah tangan, yang akhirnya menuai perkelahian. Konflik yang terjadi di tanah

Senin tanggal 16 Februari 2015, telah terjadi bentrok antara warga tanah garapan eks HGU PTPN II Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan dengan kelompok penyerang. Kasus bentrokan ini merupakan ulangan konflik pada kejadian sebelumnya. "seratusan preman ber-senjata kelewang dan balok melakukan penyerangan terhadap 300 kepala ke-luarga yang tergabung dalam kelompok tani Pembaruan Selambo". (Waspada Selasa tanggal 17 Februari 2015, hal. 1). Aksi para preman yang diduga suruhan pengembang tersebut berhasil dihalau warga setempat, bahkan 5 unit sepeda motor kelompok penyerang dibakar warga. Atas peristiwa ini, upaya hukum untuk menuntaskan konflik berke-panjangan belum terlihat dan warga tanah garapan masih diselimi trauma.

Peristiwa yang sama juga pernah terjadi di tanah garapan Kebun PTPN 2 Helvetia, Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Konflik dipicu sikap Polres Pelabuhan Belawan yang dianggap mengabaikan pengaduan korban. Merasa pengaduannya tidak ditanggapi petugas Polres Pelabuhan Belawan, korban penganiayaan di tanah garapan PTPN 2 Helvetia, selanjutnya mengadu ke Pol-dasu yang diwakili oleh Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Helvetia. Pindahannya pengaduan korban ke Pol-dasu tentu saja merupakan laporan buruk lemahnya kinerja Polres Belawan dalam menangani laporan masyarakat dan tidak bertindak untuk menyelesaikan konflik tanah garapan.

Luka mendalam akibat korban konflik rebutan tanah garapan PTPN II, Jalan Pasar II Gang Sedayu Desa Kelambir V Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang merenggut korban jiwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014. Seorang penggarap warga Jalan Wijaya Kesuma, Kecamatan Helvetia tewas setelah diserang sekelompok pemuda yang ingin menguasai tanah garapan tersebut. Penggarap tewas setelah dibacok dibagian kepala oleh kelompok penyerang membawa kelewang dan senjata lainnya.

Pada sejumlah lahan bekas HGU maupun yang masih HGU PTPN 2, masih memiliki potensi menjadi objek rebutan di Sumatera Utara. Sikap pemerintah untuk meredakan konflik dapat dikatakan masih setengah hati dan terkesan melakukan pembiaran. Langkah yang ditempuh pemerintah melalui institusi Polri umumnya sebatas mencegah perkelahian di lokasi tanah garapan. Setelah suasana dianggap reda dan aman, aparat kepolisian-pun berlalu begitu saja meninggalkan lokasi tanpa ada solusi lanjutan. Penanganan konflik yang tidak tuntas layaknya seperti api dalam sekam. Tidak jarang muncul lagi konflik yang sama, bahkan dalam skala yang lebih besar dikemudian hari. Konflik berkepanjangan tanpa ketegasan pemerintah, menyebabkan jatuhnya rentetan korban jiwa, korban harta ben-

WASPADA

WASPADA

Kamis
5 Maret 2015

B8

Fakultas Pertanian UMA Karya Wisata Ke Simanindo

MEDAN (Waspada): Sebanyak 90 Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area melakukan karya wisata (*field trip*) ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, belum lama ini.

"Kegiatan ini merupakan praktek lapangan Fakultas Pertanian dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan. Di samping itu, untuk lebih mengenal produk dalam negeri yang bersinergis dengan seni dan budaya," ujar Ir. Asmah Indrawaty, MP, selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah kepada wartawan di Kampus UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (21/2).

Menurutnya, dipilihnya Tuk Tuk Siadong disebabkan banyak terdapat sentra usaha seperti, kuliner, seni ukir dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan setelah mengenal berbagai kerajinan putra daerah itu, bisa dikembangkan oleh mahasiswa pertanian UMA. Tentunya dengan terlebih dahulu mengetahui cara berwirausaha yang efektif dan efisien serta mendapatkan nilai dan ilmu optimum dibidang pemasaran.

Karya seni ukir Simanindo sebutnya, sudah mendunia mewakili Indonesia. Berkisar 100 hasil seni ukir kurun waktu 3 bulan. Apalagi lokasi desa itu menggambarkan suasana asri dengan adat budaya Batak Toba. "Bagi mahasiswa asal Batak Toba, kunjungan ini bisa memberikan nuansa tentang mencintai dan mengetahui sampai sejauh mana keberadaan budaya kampungnya.

Humas UMA ini menyebutkan, tujuan field trip sebagai sumber informasi mengenai bentuk kewirausahaan karya seni ukir di Simanindo. Memenuhi komponen penilaian mata kuliah di Fakultas Pertanian. Sementara manfaatnya, menambah pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha karya seni ukir. Membuka wawasan tentang keberagaman budaya daerah yang perlu dilestarikan. (m49)

HARIAN Analisa

Sabtu, 28 Februari 2015

Halaman 16

Faperta UMA Fieldtrip ke Simanindo Samosir

Samosir, (Analisa)

Sebanyak 90 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (Faperta UMA) melakukan fieldtrip ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, belum lama ini.

Kegiatan ini merupakan praktik lapangan Fakultas Pertanian dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan. Disamping itu, untuk lebih mengenal produk dalam negeri yang bersinergi dengan seni dan budaya,” ungkap Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kewirausahaan Ir. Asmah Indra-wary MP, kepada wartawan di Kampus UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (26/2).

Menurutnya, dipilihnya Tuk Tuk Siadong karena banyak terdapat sentra

usaha seperti, kuliner, seni ukir dan sebagainya. Diharapkan setelah mengenal berbagai kerajinan putra daerah, bisa dikembangkan oleh mahasiswa Pertanian UMA.

“Tentunya dengan terlebih dahulu mengetahui cara berwirausaha yang efektif dan efisien serta mendapatkan nilai dan ilmu optimum di bidang pemasaran.

Karya seni ukir Simanindo sebutnya, sudah mendunia dan mewakili Indonesia. Berkisar 100 hasil seni ukir kurun waktu 3 bulan. Apalagi lokasi desa itu menggambarkan suasana asri dengan adat budaya Batak Toba.

“Bagi mahasiswa asal Batak Toba, kunjungan ini bisa memberikan nuansa tentang mencintai dan mengetahui

sampai sejauh mana keberadaan budaya kampungnya. Dan tugas kita sebagai generasi penerus mengenalkan produk budaya sekaligus berperan untuk menjadikannya lebih terkenal dan diminati turis lokal dan mancanegara,” ujarnya.

Jenis Ukiran

Humas UMA ini menyebutkan, tujuan fieldtrip sebagai sumber informasi mengenai bentuk kewirausahaan karya seni ukir di Simanindo. Selain itu juga untuk memenuhi komponen penilaian mata kuliah di Fakultas Pertanian.

Sementara manfaatnya lainnya, menambah pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha karya seni ukir dan membuka wawasan tentang keberagaman budaya daerah yang perlu dilestarikan.

Usman Pardede salah satu pedagang ukiran kayu mengatakan, ungkap Asmah kerajinan seni ukir dibutuhkan dalam tradisi keagamaan dan adat istiadat. Jenis ukiran antara lain, tunggal panalum, tungkot malehat, guri-guri, kecapi.

Begitu juga bentuk patung yang ditempatkan di depan rumah sebagai penjaga menurut kepercayaan Suku Batak. Usaha kerajinan kayu menurut Pardede dimulai sejak 1988. Kayu yang digunakan berjenis timul atau mahoni.

“Pohon yang belum ditebang bisa dibeli seharga 1,5 hingga 3 juta/ton. Bentuk ukiran pertama digunakan masyarakat Batak adalah tongkat kayu multifungsi. Tongkat ini bernama Tukkot Si Sia Lagundi. Dipakai para raja dibuat dari kayu batak,” ungkapnya. (twh)



Analisa/istimewa

FIELDTRIP SAMOSIR: 90 mahasiswa Faperta UMA dipimpin dosen Asmah Indra-wary MP berfoto bersama ketika fieldtrip ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo Samosir, belum lama ini.

HARIAN

REALITAS

Rabu, 25 Februari 2015

9

Fakultas Pertanian UMA Field Trip ke Simanindo Samosir



Medan. Realitas

Sebanyak 90 Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area melakukan field trip ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, belum lama ini.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan lapangan Fakultas Pertanian dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan. Disamping itu, untuk lebih mengenal produk dalam

negeri yang bersinergis dengan seni dan budaya, ujar Ir. Asmah Indrawaty, MP, selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah kepada wartawan di Kampus UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (21/2).

Menurutnya, dipilihnya Tuk Tuk Siadong disebabkan banyak terdapat sentra usaha seperti, kuliner, seni ukir dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan setelah mengenal berbagai kerajinan putra daerah

itu, bisa dikembangkan oleh mahasiswa Pertanian UMA. Tentunya dengan terlebih dahulu mengetahui cara berwirausaha yang efektif dan efisien serta mendapatkan nilai dan ilmu optimum di bidang pemasaran.

Karya seni ukir Simanindo sebutnya, sudah mendunia mewakili Indonesia. Berkisar 100 hasil seni ukir kurun waktu 3 bulan. Apalagi lokasi desa itu menggambarkan suasana

asri dengan adat budaya Batak Toba. "Bagi mahasiswa asal Batak Toba, kunjungan ini bisa memberikan nuansa tentang mencintai dan mengetahui sampai sejauh mana keberadaan budaya kampungnya. Dan tugas kita sebagai generasi penerus mengenalkan produk budaya sekaligus berperan untuk menjadikannya lebih terkenal dan diminati turis lokal dan mancanegara," ujarnya.

Tujuan dan Manfaat

Humas UMA ini menyebutkan, tujuan field trip sebagai sumber informasi mengenai bentuk kewirausahaan karya seni ukir di Simanindo. Memenuhi komponen penilaian mata kuliah di Fakultas Pertanian. Sementara manfaatnya, menambah pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha karya seni ukir. Membuka wawasan tentang keberagaman budaya daerah yang perlu dilestarikan.

.(r-ji)

HARIAN andalas

Rabu

25 Februari 2015

Hal. **14**

Mahasiswa FP UMA Belajar Kewirausahaan ke Samosir

Medan-andalas

Sebanyak 90 Mahasiswa Fakultas Pertanian (FP) Universitas Medan Area (MA) melakukan field trip (studi lapangan) ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, belum lama ini.

"Kegiatan ini merupakan praktik lapangan Fakultas Pertanian UMA dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan. Di samping itu, untuk lebih mengenal produk dalam negeri yang bersinergi dengan seni dan budaya," ujar Ir Asmah Indrawaty MP, selaku dosen pembimbing kepada wartawan di Kampus UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Selasa (24/2).

Menurutnya, dipilihnya Tuk Tuk Siadong disebabkan banyak terdapat sentra usaha seperti kuliner, seni ukir, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan setelah mengenal berbagai kerajinan putra daerah itu, bisa dikembangkan oleh Mahasiswa FP UMA. Tentunya dengan terlebih dahulu mengetahui cara berwirausaha yang efektif dan efisien serta mendapatkan nilai dan ilmu optimum di bidang pemasaran.

Karya seni ukir Simanindo, sebutnya, sudah mendunia mewakili Indonesia. Berkisar 100 hasil seni ukir dihasilkan dalam kurun waktu 3 bulan. Apalagi lokasi desa itu menggambarkan suasana asri dengan adat budaya Batak Toba.

"Bagi mahasiswa asal Batak Toba, kunjungan ini bisa memberikan nuansa tentang mencintai dan mengetahui sampai sejauh mana keberadaan budaya kampungnya. Dan tugas kita sebagai generasi penerus mengenalkan produk budaya sekaligus berperan untuk menjadikannya lebih terkenal dan diminati turis lokal dan mancanegara," ujarnya.

Humas UMA ini menyebutkan, tujuan field trip sebagai sumber informasi mengenai bentuk kewirausahaan karya seni ukir di Simanindo. Memenuhi komponen penilaian mata kuliah di Fakultas Pertanian. Sementara manfaatnya, menambah pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha karya seni ukir. Membuka wawasan tentang keberagaman budaya daerah yang perlu dilestarikan.

Sementara itu, Usman Pardede, pedagang ukiran kayu mengatakan, kerajinan seni ukir dibutuhkan dalam tradisi keagamaan dan adat istiadat. Jenis ukiran antara lain, tunggal panalum, tungkot dan bentuk patung yang ditempatkan di depan rumah sebagai penjaga menurut kepercayaan suku batak. Usaha kerajinan kayu menurut Pardede dimulai se-

BERITA UMUM

Medan **Bisnis**

11

Kamis, 26 Februari 2015

Mahasiswa FP UMA *Field Trip* ke Simanindo

■ zahendra

MedanBisnis – Medan

Sebanyak 90 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (FP UMA) melakukan *field trip* (perjalanan lapangan) ke Desa Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, belum lama ini.

"Kegiatan ini merupakan praktek lapangan Fakultas Pertanian dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan. Selain itu, untuk lebih mengenal produk dalam negeri yang bersinergi dengan seni dan budaya," ujar Ir Asmah Indrawaty MP selaku dosen pembimbing mata kuliah kepada wartawan di Kampus UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Rabu (25/2).

Menurutnya, dipilihnya Tuk Tuk Siadong disebabkan banyak terdapat sentra usaha seperti, kuliner, seni ukir dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan setelah mengenal berbagai kerajinan putra daerah itu, bisa dikembangkan oleh mahasiswa pertanian UMA. Tentunya dengan terlebih dahulu mengetahui cara berwirausaha yang efektif dan efisien serta mendapatkan nilai dan ilmu optimum dibidang pemasaran.

Karya seni ukir Simanindo sebutnya, sudah mendunia mewakili Indonesia. Berkisar 100 hasil seni ukir kurun waktu 3 bulan. Apalagi lokasi desa itu menggambarkan suasana asri dengan dataran

mengetahui sampai sejauh mana keberadaan budaya kampungnya. Dan tugas kita sebagai generasi penerus mengenalkan produk budaya sekaligus berperan untuk menjadikannya lebih terkenal dan diminati turis lokal dan mancanegara," ujarnya.

Humas UMA ini menyebutkan, tujuan *field trip* sebagai sumber informasi mengenai bentuk kewirausahaan karya seni ukir di Simanindo.

Memenuhi komponen penilaian mata kuliah di Fakultas Pertanian. Sementara manfaatnya, menambah pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha karya seni ukir. Membuka wawasan tentang keberagaman budaya daerah yang perlu dilestarikan.

Sementara itu, Usman Pardede, pedagang ukiran kayu mengatakan, kerajinan seni ukir dibutuhkan dalam tradisi keagamaan dan adat istiadat. Jenis ukiran antara lain, tunggal panaluan, tungkot malehat, guri-guri, kecapi.

Begitu juga bentuk patung yang ditempatkan di depan rumah sebagai penjaga menurut kepercayaan suku Batak. Usaha kerajinan kayu menurut Pardede dimulai sejak 1988. Kayu yang digunakan berjenis timul atau mahoni.

"Pohon yang belum ditebang bisa dibeli seharga Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta perton. Adapun bentuk ukiran pertama digunakan masyarakat Batak adalah tongkat kayu multi fungsi. Tongkat ini bernama Tukkot Si Sia Lagundi. Dipakai para raja dibuat dari kayu Batak."

Wafatnya Tok Guru Politik

Oleh Warjio

Beliau adalah orang yang sangat sederhana, merakyat, pemimpin yang dihormati masyarakat dari berbagai golongan. Bukan sekedar pencitraan dalam media

Sahabat saya, Seorang Wali Kota Negeri Kelantan, Malaysia, Dr Mustafa Ahmad, pada 13 Februari 2015 memberitahukan bahwa Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Aziz Nik Mat meninggal dunia pada jam 9.40. Malam di sisi keluarga kediamannya di kampung Pulau Melaka, Kota Bharu, Kelantan. Mantan Menteri Besar Kelantan itu meninggal dunia usia 84 tahun.

Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Najib, ketika sedang memberikan sambutan dalam satu acara dan diberitahu wafatnya Datuk Nik Aziz Nik Mat, langsung menghentikan pidatonya dan mengajak serta memimpin doa untuk almarhum. Dari Indonesia, Presiden PKS, Anis Mata dalam media sosial, twitter, juga merespons dan memberikan doa atas meninggalnya almarhum. Besok paginya (13/2/2015), melalui media sosial juga, saya dikirim foto dan ucapan tentang fardu kifayah almarhum.

Berdasarkan foto itu saya dapat melihat ribuan orang menghadiri acara fardu kifayah almarhum. Halaman rumah almarhum yang kecil dan sederhana, berdekatan dengan sekolah agama yang beliau tidak cukup untuk menampung ribuan orang yang datang dari berbagai kalangan dan penjuru negeri. Tulisan ini, saya maksudkan untuk menarik perhatian saya kepada masyarakat dan perhatian saya terhadap politik baik di Indonesia maupun Malaysia.

Wafatnya Tok Guru Politik Malaysia, Datuk Nik Aziz Nik Mat akan banyak meninggalkan perasaan kehilangan. Almarhum adalah seorang pemimpin yang sangat sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat. Ini sebuah kepemimpinan dimana almarhum menunjukkan kepribadian yang sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat.

Beliau adalah orang yang sangat sederhana, merakyat, pemimpin yang dihormati masyarakat dari berbagai golongan. Bukan sekedar pencitraan dalam media

Hal ini disebabkan di samping almarhum seorang pemimpin, beliau juga seorang guru. Bukan saja mengajarkan agama tetapi juga politik.

Saya mengenal almarhum sejak 15 tahun lalu. Waktu itu (tahun 2000) almarhum baru saja terpilih menjadi Menteri Besar Kelantan dari Partai Islam SeMalaysia (PAS). Pemilu 1999 Malaysia, dengan kepemimpinan almarhum, PAS berhasil memenangkan banyak suara di negeri-negeri di Malaysia, termasuk Kelantan. Pemerintah Malaysia—yang waktu itu dipimpin Tun Mahathir Mohammad, harus kehilangan banyak kursi baik di tingkat parlemen maupun negeri. Koalisi partai pemerintah yang dipimpin Tun Mahathir Mohammad, Barisan Nasional (BN), kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan hampir kehilangan kekuasaannya secara menyeluruh di seluruh negeri di Malaysia.

BN yang terdiri dari partai Melayu (UMNO), partai China (MCA) dan partai India (MIC) kehilangan banyak kursi yang mengakibatkan kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohammad goyang. Satu faktor yang menyebabkan mengendurnya BN di bawah Tun Mahathir Mohammad dan menguatnya Barisan Alternatif (BA)—yaitu Koalisi partai politik oposisi yang dikendalikan oleh PAS, adalah faktor kepemimpinan dan figur Nik Aziz Nik Mat. Figur dan kepemimpinan Nik Aziz Nik Mat telah berhasil menyatukan rakyat Malaysia dan bersatu menghempang dominasi BN.

Tiga faktor yang menjadi ikon yang melekat dalam figur dan kepemimpinan Nik Aziz Nik Mat adalah Keislaman, kemelayuan dan Kesejahteraan Bersama berhasil menjadi perekat masyarakat Malaysia untuk memilih Barisan Alternatif. Faktor Keislaman—yang menjadi ikon PAS yang dipimpin Nik Aziz Nik Mat seolah memberikan harapan baru bahwa Islam dapat dijadikan dalam panduan dan identitas Malaysia yang mulai terkikis di bawah BN. Sedangkan ikon kemelayuan melambangkan harapan akan bangkitnya orang Melayu—yang selama ini jadi ikon UMNO, dari peminggiran politik dan ekonomi. Kesejahteraan Bersama adalah ikon yang melambangkan persatuan berbagai etnik dan agama yang memberi kepercayaan pada PAS.

Beliau adalah orang yang sangat sederhana, merakyat, pemimpin yang dihormati masyarakat dari berbagai golongan. Bukan sekedar pencitraan dalam media

Wan Azizah ataupun Karpal Singh. Persatuan mereka ini dalam BA—yang terdiri dari PAS, Partai Keadilan dan *Democratisation Action Party* (DAP), menjadi rival yang mematikan bagi BN.

Sebagai seorang calon Master dalam bidang Politik Islam di Universiti Sains Malaysia (USM) dengan mengambil tesis penelitian tentang PAS dan Malaysia, saya terlibat dalam perpolitikan Malaysia. Berbagai pertemuan politik baik yang diadakan oleh BA dan PAS saya ikuti. Hal ini semata-mata untuk mematangkan data saya tentang PAS. Keadaan ini menyebabkan saya banyak bertemu dan bergaul dengan tokoh-tokoh politik BA, walaupun kadang-kadang harus "pandai-pandai menjaga diri" karena waktu itu pengawasan keamanan rezim BN di bawah Tun Mahathir Mohammad sangat kuat sekali. Saya pernah dicurigai sebagai "mata-mata" dari dua kepentingan politik, BN dan BA.

Keulamaan, kepolitikan dan kepemimpinan Nik Aziz Nik Mat telah menarik perhatian saya. Ketika melakukan penelitian tesis di Kelantan—atas bantuan sahabat saya—Dr Kamarul Yusoff, saya bukan saja berhasil mengumpulkan data-data berharga tentang PAS dan UMNO, juga dapat bertemu langsung dan mewawancarai Menteri Besar Kelantan, Nik Aziz Nik Mat. Walaupun saya telah mendapatkan informasi tentang beliau yaitu tentang kesederhanaannya. Saya benar-benar mendapatkan fakta bahwa beliau adalah orang yang sangat sederhana, merakyat, pemimpin yang dihormati masyarakat dari berbagai golongan. Bukan sekedar pencitraan dalam media.

Di tengah kesibukan beliau memberikan ceramah selepas shalat Shubuh, dimana beliau jadi imamnya, banyak masyarakat yang mendatangi hanya sekedar muzakarah, memotongkan rambut anak bayi atau malah sekedar untuk salaman. Ini pengalaman berharga saya menyaksikan seorang pemimpin jadi imam shalat Shubuh yang jamaahnya sangat banyak dan memenuhi masjid. Di tengah kesibukan dengan rakyatnya itu, tanpa kelihatan lelah Beliau memberikan waktu untuk saya mewawancarnya terkait tesis saya tanpa birokrasi. Padahal saya adalah "orang asing".

Dari wawancara dengan beliau inilah saya semakin mengetahui kedalaman keilmuan beliau terhadap agama Islam, tentang Islam Politik dan pentingnya persatuan Islam. Dalam wawancara itu malah beliau sampaikan pentingnya membangun kekuatan Indonesia-Malaysia khususnya dari segi Islam Politik. Dari beliau saya tahu bahwa kekuatan Islam politik tidak bisa dibangun secara sendiri tetapi harus secara bersama-sama.

Penutup

Datuk Nik Aziz Nik Mat telah menorehkan sejarah emas bukan saja dalam konteks Islam Politik di Malaysia tetapi

HARIAN

Analisa

Senin, 23 Februari 2015

Halaman 27

Langkah-langkah Pencegahan Diabetes

Oleh: Drs.H.Syafruddin Ritonga,MAP

"MENEGAH lebih baik dari pada mengobati". Pepatah ini sudah sangat lama dan masih relevan hingga sekarang. Pencegahan penyakit merupakan hal yang sangat penting, namun terkadang sering terlupakan. Sepereti halnya penyakit diabetes, sangat mungkin dicegah.

Mencegah diabetes dimaksudkan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menjadi pencetus serangan utamanya, yaitu mencegah kondisi tingginya kadar gula darah (KGD) melebihi kadar normal yang telah direkomendasikan oleh dokter. Lalu langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyakit Diabetes? Berikut ini cara pencegahan diabetes.

Kondisi diabetes dikatakan sebagai faktor resiko yang menempati urutan terbesar dalam mencetuskan penyakit diabetes. Selain itu, berbagai penyakit berat lainnya juga dapat menjadi akibat turunan dan obesitas. Dengan mengurangi obesitas berarti kita sedang mengurangi resiko serangan diabetes. Oleh karena itu program penurunan berat badan menjadi program utama dalam pencegahan penyakit diabetes. Mulailah menetapkan tujuan untuk mencapai berat badan yang ideal/normal. Cara yang efektif untuk menurunkan diabetes adalah pengaturan pola makan atau diet dan olahraga. Ada jenis diet yang bisa dipilih, tetapi tentunya harus yang sehat.

Bagaimana diet yang sehat itu?
Diet yang sehat adalah diet yang tidak menyiksa diri, bukan dengan tidak makan, tidak makan malam, lebih-lebih dengan bantuan suntik, dan obat-obatan. Cara-cara seperti ini beresiko dan menyebabkan banyak penyakit pada diri sendiri, efek samping, dan hasil yang pasti tidak permanen. Biasanya diet yang baik diartikan dengan setelah melakukan diet berat badan akan melonjak tinggi. Gaya hidup menjadi fokus

tidak sehat berhubungan dengan kondisi sel-sel tubuh yang tidak sehat sementara sel-sel yang sehat merupakan kondisi yang sempurna untuk mencegah terjadinya diabetes karena semua fungsi organ dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu mengubah gaya hidup yang buruk menjadi penting artinya. Beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menerapkan gaya hidup yang sehat, yaitu:

Istirahat dan Tidur yang Cukup

Tidur sangat bermamfaat untuk memberikan kesempatan kepada tubuh dalam beregenerasi. Setiap harinya sel-sel tubuh mengalami kerusakan, baik karena sebab alami maupun karena sebab-sebab radikal bebas. Proses regenerasi ini memegang peranan yang sangat penting. Dalam hal ini orang yang kurang tidur membuat proses ini tidak berjalan dengan baik, dalam jangka panjang kerusakan-kerusakan sel akan meluas tanpa didukung dengan pertumbuhan sel-sel baru jadi, cukuplah kebutuhan tidur untuk mengistirahatkan tubuh dan memberi kesempatan kepadanya untuk proses-proses alamiah. Kecukupan tidur tiap-tiap individu berbeda, tetapi yang paling umum sekitar 7-8 jam per hari. Apa bila saat ini kita mengalami gangguan atau kesulitan tidur, konsultasilah ke dokter untuk mendapatkan solusi memperbaiki kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur yang baik akan membuat kita mengikuti pola hidup yang sehat dan pada gilirannya bermamfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Olahraga Rutin

Olahraga merupakan salah satu gaya hidup yang sehat, olahraga juga menjadi hal baik untuk dilakukan guna mengurangi faktor resiko diabetes. Olahraga secara rutin akan membantu tubuh menggunakan insulin dan memproses glukosa dengan lebih baik.

berlaku tidak sehat. Stress dapat menjadi salah momok yang dapat memicu kenaikan kadar gula darah (KGD). Mengingat hal itu maka sangat diperlukan manajemen stress pada masing-masing individu. Pelajari teknik manajemen stress yang baik dan tehnik relaksasi seperti yoga, latihan pernapasan, atau meditasi biasa membantu mengendalikan kondisi stres ini.

Terahir, dalam mewujudkan gaya hidup yang sehat dilakukan dengan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, di antaranya kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Rokok dan alkohol merupakan factor resiko timbulnya diabetes. Keduanya juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit berat lainnya, seperti penyakit jantung dan kerusakan-kerusakan organ lain di dalam tubuh.

Pantau Kadar Gula Darah Secara Teratur

Untuk mencegah diabetes, perlu memantau kadar gula darah secara rutin. Pemantauan rutin ini adalah deteksi dini terhadap kondisi hiperglikemia agar cepat bisa diketahui. Lalu ketika kadar gula darah naik, langkah-langkah pengendalian bisa cepat dilakukan. Dengan begitu keadaan hiperglikemia tidak sampai menetap lama dan akan kembali normal. Selain itu perlu memantau tekanan darah, kadar kolesterol dan kadar HDL di dalam tubuh secara rutin. Ketiga hal ini dapat menjadi pemicu diabetes. Pengendalian terhadapnya akan dapat menurunkan resiko terserang diabetes sekaligus menjaga dampak buruk terhadap kesehatan lainnya.

Waspada Faktor Resiko Diabetes yang Lain

Langkah terahir adalah memahami dan cermati faktor resiko diabetes lain, dengan memahami semua faktor resiko diabetes yang ada, sehingga pengendalian menjadi lebih mudah dilakukan. Misalnya, jika seseorang dalam keluarga (orang tua atau saudara kandung) ada yang menderita diabetes, maka untuk melindungi diri dari

Miss Korupsi 2015, Siapakah?

Oleh: Andi Hakim Lubis

Miss Indonesia merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan untuk contest kecantikan di Indonesia diselenggarakan oleh MNC (Media Nusantara Citra) Group melalui yayasan miss Indonesia dengan dukungan, berbagai perusahaan kosmetik, fashion, dan lain-lain. Ajang contest kecantikan ini sejak tahun 1992 dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat wanita Indonesia yang siap menjadi seorang figur publik dan menjadi duta di bidang sosial, ekonomi di forum – forum internasional. Pada Selasa dinihari (17-02-2015) malam ini akan berlangsung pengumuman pemenang miss Indonesia 2015 yang akan diumumkan oleh finalis cantik, cerdas dan berprestasi DI Yogyakarta bernama Maria yang telah mengalahkan 34 finalis miss Indonesia. memang layak untuk menjadi duta wanita selain cantik yang juga menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Ekonomi di Universitas Lintas, setelah miss Indonesia

2015 mendapatkan pemenangnya. Penulis langsung berfikir miss korupsi 2015, siapakah? namun miss korupsi dimaksud bukan seperti miss Indonesia yang menjadi figur, tauladan, serta memiliki tanggung jawab. akan tetapi miss korupsi adalah miss yang tidak patut dicontoh perangnya, tabiatnya karena telah mengambil yang bukan haknya (korupsi).

Pertanyaan ini memang pantas menjadi refleksi di waktu-waktu senggang yang kita miliki. Bagaimana tidak, semenjak beberapa tahun belakangan ini keterlibatan perempuan dan korupsi memang marak terjadi. Kejadian ini bukan tanpa sebab, emansipasi keterlibatan perempuan dalam praktik penyelenggaraan negara menjadi alasan utama terjerumusnya perempuan ke dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik beberapa decade terakhir juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan emansipasi perempuan dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bisa dihindarkan.

Korupsi memang menjadi penyakit sosial yang sangat susah untuk diantisipasi mau-

pun diberantas sampai mati. Banyak regulasi yang tidak jelas guna menanggulangi kejahatan yang sudah dianggap luarbiasa ini (extraordinary). Mulai dari hukuman dipenjara seumur hidup hingga yang kontroversi yakni hukuman mati. Solusi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menjadi akar bagi masalah – masalah lain. Dampak yang ditimbulkan bukan main-main: Kehadiran korupsi dalam praktek penyelenggaraan negara mampu memberikan bahaya yang cukup signifikan terhadap stabilitas dan keamanan negara. Lebih parah lagi mampu merusak nilai – nilai demokrasi negara Indonesia.

Sebab Korupsi

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan bernada genting “*power tends to corrupt, but absolute power absolutely*” yang dalam pengertiannya kekuasaan penuh cenderung disalah gunakan, tapi kekuasaan yang mutlak pasti disalah gunakan. Ungkapan dari seorang tokoh tersebut mengindikasikan bahwa kekuasaan lah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Tidak

seorang melakukan tindak pidana korupsi adalah kekuasaan yang dimilikinya. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya (LSM) dan rakyat juga harus proaktif dalam mengawal praktik penyelenggaraan negara agar bersih dan terhindar dari kejahatan korupsi. penulis yakin dengan, pengawalan yang terus proaktif oleh rakyat dan LSM serta upaya pencegahan terhadap penyelewengan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, negara kita mungkin bisa terhindar dari kejahatan korupsi.

Perempuan dan Korupsi

Terkait keterlibatan perempuan dengan tindak pidana korupsi, hal ini memang tidak bisa dihindarkan karena keterlibatan mereka dalam praktik penyelenggaraan negara. Kita juga harus ingat ungkapan Lord Acton, kekuasaan yang membuat kita menyalahgunakan wewenang. Jadi, siapapun orangnya, baik laki – laki maupun perempuan ketika mereka memiliki kekuasaan penuh maka mereka akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan

dalam upaya memberantas kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya (LSM) dan rakyat juga harus proaktif dalam mengawal praktik penyelenggaraan negara agar bersih dan terhindar dari kejahatan korupsi. penulis yakin dengan, pengawalan yang terus proaktif oleh rakyat dan LSM serta upaya pencegahan terhadap penyelewengan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, negara kita mungkin bisa terhindar dari kejahatan korupsi.

Perempuan dan Korupsi

Terkait keterlibatan perempuan dengan tindak pidana korupsi, hal ini memang tidak bisa dihindarkan karena keterlibatan mereka dalam praktik penyelenggaraan negara. Kita juga harus ingat ungkapan Lord Acton, kekuasaan yang membuat kita menyalahgunakan wewenang. Jadi, siapapun orangnya, baik laki – laki maupun perempuan ketika mereka memiliki kekuasaan penuh maka mereka akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan

juga patut diapresiasi. Karena perempuan juga memberikan kontribusi dalam menggiring negara Indonesia menjadi merdeka. Seperti R.A Kartini, Cut Nyak Dien, Malahayati dan lain-lain. Mereka pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Selain itu, negara Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau pernah menjadi presiden Indonesia yang ke 5 setelah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disebut dengan Gusdur. Dewasa ini banyak pula perempuan yang menjadi menteri, kepala daerah, walikota, wakil rakyat. Kenyataan ini membuktikan bahwa emansipasi wanita untuk terlibat urusan politik dalam penyelenggaraan negara meningkat setiap tahunnya. Dan tidak bisa kita pungkiri pula, 3 tahun belakangan ini banyak yang terlibat kasus korupsi.

Pada tahun 2012, Miranda Swaray Goeltorn, didakwa telah melakukan kasus suap cek pelawat anggota DPR dalam pemilihan Deputy Gubernur senior Bank Indonesia periode 2004.

(Bersambung ke hal. 29)

Miss Korupsi... (sambungan dari hal. 25)

Akibat penyalahgunaan wewenangnya ini Miranda Goeltorn didakwa oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi vonis hukuman selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 100 juta. (BBC Indonesia)

Pada tahun 2013, khalayak ramai dikejutkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh politisi Partai Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran DPR yakni Aneta Pinkan Sondakh. Mantan Aneta dari PT. Group Permai atas ke-

Pada tahun 2014, Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah dihukum selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta, subsidi 5 bulan kurungan. Atut terbukti menyuap ketua Makkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp. 1 milyar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten. Ia terbukti bersama – sama komisaris utama PT. Bali Pacific Pragam (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk memberikan uang tersebut kepada Akil Mochtar agar memenangkan gugatan yang diajukan pasangan lain yakni Amir Hamzah

Selasa, 3 Maret 2015

Halaman 7

Banyak Kasus Hukum Daerah Ditangani Advokat Jakarta

Medan, (Analisa)

Banyak kasus hukum di daerah ditangani oleh advokat yang berkantor di Jakarta, sehingga masih terdapat kesenjangan kompetensi antara advokat Jakarta dan daerah.

Hal itu diakui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution di dalam sambutan pada acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di convention hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Medan Sabtu (28/2).

PKPA itu berlangsung dari 31 Januari - 28 Februari tersebut, digelar oleh kerjasama Fakultas Hukum UMA dan DPN Peradi.

Acara penutupan dihadiri Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik Sahumzal SH MH, WD III Bidang Kemahasiswaan Taufik Siregar SH, MHum, Guru Besar FH UMA Prof Hidarman, Ketua Panitia PKPA FH UMA Ridho Mubarak SH MH, dan

unsur Pengurus DPC Peradi Medan.

Lebih lanjut Hasanuddin Nasution mengatakan Kota Medan sendiri sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, masih membutuhkan advokat-advokat yang kompeten

"Untuk itu, perguruan tinggi dan Peradi punya tanggungjawab besar melahirkan advokat-advokat berkompeten," katanya.

Hasanuddin juga menyatakan mempunyai mimpi, agar keadvokatan nantinya sudah dipelajari sejak mahasiswa fakultas hukum duduk di semester I. Hal itu, ungkapnya, sudah mulai diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Berharap

Dia ingin, alumni Fakultas Hukum UMA seperti alumni FH Universitas Indonesia yang menguasai korporasi-korporasi di Indonesia. Sayangnya, Kota Medan sendiri baru memiliki seorang kurator yang bertugas menangani kepailitan.

"Saya berharap, advokat harus jadi pemain di daerah sendiri," jelasnya seraya berharap peserta PKPA benar-benar menguasai hukum acara pidana

dan perdata, sedangkan yang lainnya seperti hukum acara tata usaha negara, peradilan agama dan mahkamah konstitusi adalah bonus.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam sambutannya berharap, kerjasama DPN Peradi dan FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA berlanjut.

Keberlanjutan ini, agar FH UMA melahirkan advokat dan pendekar-pendekar hukum yang membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Dekan FH UMA, Prof Syamsul Arifin menyampaikan terimakasih kepada DPN Peradi yang memberikan kepercayaan kepada fakultas yang dipimpinnya untuk melaksanakan PKPA angkatan I. "Saya berharap akan ada PKPA angkatan kedua dan seterusnya," kata dekan.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA angkatan I UMA ini diikuti 41 peserta terdiri dari alumni FH UMA dan lulusan perguruan tinggi lain di Pulau Sumatera.

PKPA, katanya sesuai dengan UU Keadvokatan merupakan syarat mutlak menjadi advokat. (twh)

HARIAN

REALITAS

Senin, 2 Maret 2015

12

PKPA FH UMA-Peradi Berakhir

**Ada Kesenjangan Advokat
Jakarta dan Daerah****Medan, Realitas**

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution SH mengakui, ada kesenjangan kompetensi antara advokat Jakarta dan daerah. Buktinya, banyak kasus hukum di daerah ditangani oleh advokat yang berkantor di Ibukota Jakarta.

"Kesenjangan kompetensi advokat ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kita prihatin melihat, kasus-kasus hukum dan perjuangan soal keadilan di daerah ditangani orang-orang Jakarta yang sok pintar itu," kata Hasanuddin saat menyampaikan sambutan pada acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di convention hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (28/3).

PKPA yang berlangsung dari 31 Januari - 28 Februari itu digelar atas kerja sama Fakultas Hukum UMA dan DPN Peradi. Acara penutupan dihadiri Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik Suhatrizal SH MH, WD III Bidang Kemahasiswaan Taufik Siregar SH, MHum, Guru Besar FH UMA Prof Edwarman, Ketua Panitia PKPA FH UMA Ridho Mubarak SH MH, dan unsur Peradi Peradi Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perguruan tinggi dan Peradi punya tanggung jawab besar melahirkan advokat-advokat berkompeten," katanya.

Hasanuddin juga menyatakan punya mimpi, agar keadvokatan nantinya sudah dipelajari sejak mahasiswa fakultas hukum duduk di semester I. Hal itu, katanya, sudah mulai diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Dia ingin, alumni Fakultas Hukum UMA seperti alumni FH UI yang menguasai korporasi-korporasi di Indonesia. Sayangnya, Kota Medan sendiri baru memiliki seorang kurator yang bertugas menangani kepailitan.

"Saya berharap, advokat harus jadi pemain di daerah sendiri," tandasnya seraya berharap peserta PKPA benar-benar menguasai hukum acara pidana dan perdata, sedangkan yang lainnya seperti hukum acara tata usaha negara, peradilan agama dan mahkamah konstitusi adalah bonus.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam sambutannya berharap, kerja sama DPN Peradi dan FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA berlanjut. Ini agar FH UMA melahirkan advokat dan pendekar-pendekar hukum yang membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Sedangkan Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin menyampaikan terimakasih kepada DPN Peradi yang memberikan kepercayaan kepada fakultas yang dipimpinnya melaksanakan PKPA angkatan I. "Saya berharap akan ada PKPA angkatan kedua dan seterusnya," kata dekan.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA angkatan I UMA ini diikuti 41 peserta terdiri dari alumni FH UMA dan lulusan perguruan tinggi lain di Pulau Sumatera. Dia menegaskan, PKPA sesuai dengan UU Keadvokatan merupakan syarat mutlak menjadi advokat. (R-ji)



FOTO BERSAMA: Sekjen DPN Peradi Hasanuddin Nasution (tengah/duduk) dihadirkan bersama WD I UMA

HARIAN andalas

Senin

2 Maret 2015

Hal.

2

Ada Kesenjangan Antara Advokat Jakarta dan Daerah

Medan-andalas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution SH mengakui ada kesenjangan kompetensi antara advokat Jakarta dan daerah. Buktinya, banyak kasus hukum di daerah ditangani advokat yang berkantor di Ibu Kota Jakarta.

"Kesenjangan kompetensi advokat ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kita prihatin melihat kasus-kasus hukum dan perjuangan soal keadilan di daerah ditangani orang-orang Jakarta yang sok pintar itu," kata Hasanuddin saat menyampaikan sambutan pada acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (28/3).

PKPA yang berlangsung dari 31 Januari - 28 Februari itu digelar atas kerja sama Fakultas Hukum UMA dan DPN Peradi. Acara penutupan dihadiri Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik Suhatrizal SH MH, WD III Bidang Kemahasiswaan Taufik Siregar SH MH, Guru Besar FH UMA Prof Ediwarman, Ketua Panitia PKPA FH UMA Ridho Mubarak SH MH, dan unsur Pengurus DPC Peradi Medan.

Kota Medan sendiri sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, kata Hasanuddin, membutuhkan advokat-advokat yang kompeten. "Untuk itu, perguruan tinggi dan Peradi punya tanggung jawab besar melahirkan advokat-advokat ber-kompeten," katanya.

Hasanuddin juga menyatakan punya mimpi, agar keadvokatan nantinya sudah dipelajari sejak mahasiswa fakultas hukum duduk di semester I. Hal itu, katanya, sudah mulai diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Dia ingin, alumni Fakultas Hukum UMA seperti alumni FH UI yang menguasai korporasi-korporasi di Indonesia. Sayangnya, Kota Medan sendiri baru memiliki seorang kurator yang bertugas menangani kepailitan.

"Saya berharap, advokat harus jadi pemain di daerah sendiri," tandasnya seraya berharap peserta PKPA benar-benar menguasai hukum acara pidana dan perdata, sedangkan yang lainnya seperti hukum acara tata usaha negara, peradilan agama dan mahkamah konstitusi adalah bonus.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam sambutannya berharap, kerja sama DPN Peradi dan FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA berlanjut. Ini agar FH UMA melahirkan advokat dan pendekar-pendekar hukum yang membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Sedangkan Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin menyampaikan terima kasih kepada DPN Peradi yang memberikan kepercayaan kepada fakultas yang dipimpinnya melaksanakan PKPA angkatan I. "Saya berharap akan ada PKPA angkatan kedua dan seterusnya," kata dekan.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA Angkatan I UMA ini diikuti 41 peserta terdiri dari alumni FH UMA dan lulusan perguruan tinggi lain di Pulau Sumatera. Dia menegaskan, PKPA sesuai dengan UU Keadvokatan merupakan syarat mutlak menjadi advokat.

(HAM)

Mimbar Umum

SENIN, 1 MARET 2015

Halaman

2



Sekjen DPN Peradi Hasanuddin Nasution (tengah/duduk) diabadikan bersama WR III UMA Zulheri Noer, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Guru Besar FH UMA Prof Ediwarman dan panitia PKPA seusai penutupan PKPA, Sabtu (28/2). (Foto: Ist)

Ada Kesenjangan Advokat Jakarta dan Daerah

PKPA FH Kerjasama UMA-Peradi Berakhir

Medan, (Mimbar) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution SH mengakui, ada kesenjangan kompetensi antara advokat Jakarta dan daerah. Buktinya, banyak kasus hukum di daerah ditangani oleh advokat yang berkantor di Ibukota Jakarta.

"Kesenjangan kompetensi advokat terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kita prihatin melihat kasus-kasus hukum yang seharusnya ditangani oleh advokat di daerah, tetapi justru ditangani oleh advokat yang berkantor di Jakarta," kata Hasanuddin.

gelar atas kerja sama Fakultas Hukum UMA dan DPN Peradi. Acara penutupan dihadiri Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Wakil

Kota Medan sendiri sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, kata Hasanuddin, membutuhkan advokat-advokat yang kompeten. "Untuk itu, perguruan tinggi dan Peradi punya tanggung jawab besar melahirkan advokat-advokat berkompeten," katanya.

Hasanuddin juga menyatakan punya mimpi, agar keadvokatan nantinya sudah dipelajari sejak mahasiswa fakultas hukum duduk di semester I. Hal itu, katanya, sudah mulai diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Dia ingin, alumni Fakultas Hukum UMA seperti alumni FH UI yang menguasai korporasi-korporasi di Indonesia. Sayangnya, Kota Medan sendiri baru memiliki seorang kurator yang bertugas menangani kepailitan.

dan mahkamah konstitusi adalah bonus.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam sambutannya berharap, kerja sama DPN Peradi dan FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA berlanjut. Ini agar FH UMA melahirkan advokat dan pendekar-pendekar hukum yang membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Sedangkan Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin menyampaikan terimakasih kepada DPN Peradi yang memberikan kepercayaan kepada fakultas yang dipimpinnya melaksanakan PKPA angkatan I. "Saya berharap akan ada PKPA angkatan kedua dan seterusnya," kata dekan.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA angkatan

MedanBisnis**IV**

Selasa, 3 Maret 2015

PKPA FH UMA-Peradi Berakhir Ada Kesenjangan Advokat Jakarta dan Daerah

■ zahendra

MedanBisnis—Medan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution SH mengakui, ada kesenjangan kompetensi antara advokat Jakarta dan daerah. Buktinya, banyak kasus hukum di daerah ditangani oleh advokat yang berkantor di ibukota Jakarta.

"Kesenjangan kompetensi advokat ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kita prihatin melihat kasus-kasus hukum dan perjuangan soal keadilan di daerah ditangani orang-orang Jakarta," kata Hasanuddin saat menyampaikan sambutan pada acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di convention hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (28/2).

PKPA yang berlangsung dari 21 Januari - 28 Februari itu digelar atas kerja sama Fakultas

Hukum UMA dan DPN Peradi. Acara penutupan dihadiri Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin, Wakil Dekan (WD) I Bidang Akademik Suhatrizal SH MH, WD III Bidang Kemahasiswaan Taufik Siregar SH MH, Guru Besar FH UMA Prof Ediwarman, Ketua Panitia PKPA FH UMA Ridho Mubarak SH MH, dan unsur Pengurus DPC Peradi Medan.

Kota Medan sendiri sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, kata Hasanuddin, membutuhkan advokat-advokat yang kompeten. "Untuk itu, perguruan tinggi dan Peradi punya tanggung jawab besar melahirkan advokat-advokat berkompeten," katanya.

Hasanuddin juga menyatakan punya mimpi, agar keadvokatan nantinya sudah dipelajari sejak mahasiswa fakultas hukum duduk di semester I. Hal itu, katanya, sudah mulai diterapkan di Fakultas Hukum

Universitas Tarumanegara Jakarta. Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam sambutannya berharap, kerja sama DPN Peradi dan FH UMA dalam penyelenggaraan PKPA berlanjut. Ini agar FH UMA melahirkan advokat dan pendekar pendekar hukum yang membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Sedangkan Dekan FH UMA Prof Syamsul Arifin menyampaikan terimakasih kepada DPN Peradi yang memberikan kepercayaan kepada fakultas yang dipimpinnya melaksanakan PKPA angkatan I. "Saya berharap akan ada PKPA angkatan kedua dan seterusnya," kata dekan.

Sebelumnya, Ketua PKPA UMA Ridho Mubarak melaporkan, PKPA angkatan I UMA ini diikuti 41 peserta terdiri dari alumni FH UMA dan lulusan perguruan tinggi lain di Pulau Sumatera. Dia menegaskan, PKPA sesuai dengan UU Keadvokatan merupakan syarat mutlak menjadi advokat. ●